

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan tentang capaian Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja juga menjadi salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada triwulan selanjutnya.

Bungo, 29 April 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Bungo



Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, stakeholder dan masyarakat. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja.

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW 1 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	119,4	Tidak dapat disimpulkan 
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	106,70	Sangat Baik 
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	26,12	Kurang 
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	75	Cukup 
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tidak terdefinisi	Tidak dapat disimpulkan 
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,32	Cukup 
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	Penilaian di akhir tahun
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	Baik 
Total Capaian		510,54	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		85,09	
Predikat NKO		Baik	

Dari 8 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berdasarkan evaluasi Triwulan I terdapat 1 sasaran strategis dengan

kategori Sangat Baik, 1 sasaran strategis dengan kategori Baik, 2 sasaran strategis dengan kategori cukup, 1 sasaran strategis dengan kategori kurang, 2 sasaran strategis dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, dan 1 sasaran strategis yang belum dilakukan penilaian Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sebesar 119,4% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini menggambarkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah tersebut.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis kedua “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT” dengan nilai capaian 106,70 dengan kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kapasitas, peralatan, dan SDM laboratorium yang mendukung pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Capaian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan, keamanan pangan, dan perlindungan masyarakat.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)” sebesar 26,12% dengan kategori kurang. Berdasarkan Analisa dari capaian keberhasilan dari nilai indeks efektivitas KIE adalah adanya perencanaan yang sudah dibuatkan dari awal walaupun terkendala dengan anggaran yang masih terblokir. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dialihkan dengan daring dan jempot bola di tempat publik (KIE *Face to Face*). Perencanaan juga dilakukan pada KIE media dimana semua petugas wajib membuat postingan setiap bulannya sesuai tema yang ditentukan. Dari semua perencanaan akan dimonitoring setiap triwulannya agar dapat di evaluasi dan ditindaklanjuti apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Selain perencanaan, Sumber Daya Manusia

yang kompeten juga menunjang dari keberhasilan capaian ini, semua personil dan petugas Loka POM di Kabupaten Bungo dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam realisasi pada triwulan I ini.

- Capaian kinerja pada sasaran strategis keempat "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu" sebesar 75% dengan kategori Cukup. Berdasarkan hasil capaian di TW 1 terhadap target tahun 2025, telah diperoleh capaian progress tahapan sebesar 17,54%, hal ini dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan telah dilakukan sesuai timeline. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Pangan Olahan. Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan telah dilakukan melalui daring. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah UMKM yang berasal dari wilayah kerja UPT, dari kegiatan ini dapat menjadi gambaran UMKM yang akan mengikuti program pendampingan oleh Loka POM. Namun, karena efisiensi anggaran sebanyak 87,94%, sehingga kegiatan dialihkan secara daring, kurang berdampak kepada pelaku usaha, sebagian pelaku usaha tidak fokus dan tampak kurang tertarik saat pelaksanaan kegiatan karena sambil melaksanakan kegiatan harian. Namun, dengan itu tidak menutupi minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk di BPOM.
- Capaian sasaran strategis kelima "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif" di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dikategorikan tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan oleh perencanaan target di TW 1 adalah 0 (nol) namun terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia dengan tahapan proses penerbitan SPDP di Bulan Maret 2025 sehingga capaian terhadap target bulanan menjadi lebih besar daripada perencanaan.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis keenam "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif" sebesar 83,32% dengan kategori Cukup. Hal ini dikarenakan pelaporan patrol siber Bulan Januari-Maret 2025 dan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-Februari 2025 yang tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan di Bulan Maret 2025 (pelaporan NIHIL)

dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.

- Capaian kinerja pada sasaran strategis ketujuh "Layanan Publik UPT yang prima" yang belum dinilai pada Triwulan I menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo belum dapat dilakukan pada periode ini.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" sebesar 100% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM Kabupaten Bungo berhasil mencapai tata kelola organisasi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp3.572.436.000,-. Pada Bulan Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo mendapat tambahan anggaran Belanja Barang yang diperuntukkan untuk Honor PPNPN sebesar Rp 30.000.000,-. Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo pada Triwulan I menjadi Rp 3.602.436.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp 813.884.314,- atau 22,59% Secara garis besar, Loka POM di Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025. Namun dalam pencapaian ini masih ditemukan kendala antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.

5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

Loka POM di Kabupaten Bungo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

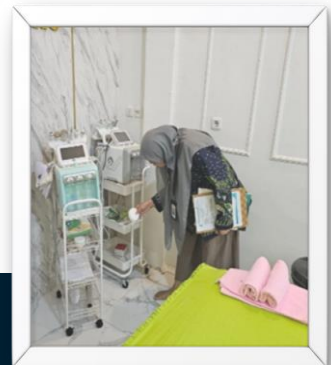
- a. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkahlangkah perbaikan;
- b. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran mengikuti adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.
- d. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

HIGHLIGHT

TRIWULAN I

2025

INTENSIFIKASI PENGAWASAN SARANA KOSMETIK



Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025. Dilaksanakan pada 6 sarana distribusi kosmetik yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo. Ditemukan temuan produk sebanyak 26 item sebanyak 446 pcs dengan total nilai Rp 10.328.000,-.

INTENSIFIKASI PENGAWASAN SARANA PANGAN



Loka POM di Kabupaten Bungo dan lintas sektor Pemerintahan daerah diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka bulan Ramadhan dan idul fitri. Dilaksanakan pada 23 sarana distribusi pangan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 17 Sarana pangan memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan

PENGAWASAN JAJANAN RAMADHAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH



Maret – April 2025, Dalam rangka pengawasan pangan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H. Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan kegiatan ini di masing - masing wilayah kerja bersama dengan Pemerintah daerah setempat, seperti Plt. Asisten II, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan perternakan serta Dinas Perikanan baik di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan berfokus pada uji cepat bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow yang diduga terdapat pada pangan takjil Ramadhan.

OPERASI PENINDAKAN TERPADU LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO TERKAIT PEREDARAN OBAT-OBAT TERTENTU ILEGAL



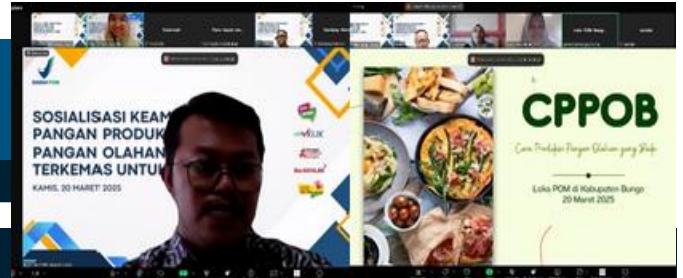
14 Maret 2025 Loka POM Di Kabupaten Bungo didampingi Polres Merangin Melakukan kegiatan Operasi Penindakan terpadu terkait informasi pengiriman Obat-obat Tertentu (OOT). Dalam kegiatan operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku dan menemukan OOT yang tidak memiliki izin edar, diantaranya berupa 202 (dua ratus dua) tablet jenis Tramadol dan 930 (sembilan tiga ratus puluh) Butir tablet jenis Hexymer. Dari kejadian tersebut Pasal yang dilanggar : Telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Kesehatan yaitu Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP dan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

KIE pada HUT BPOM



Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Badan POM yang ke-24 Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Layanan serentak dengan tema “Cek Produkmu Bersama BPOM” pada Minggu, 19 Januari 2025 di area Car Free Day Kabupaten Bungo. Kegiatan ini meliputi edukasi terkait Obat dan Makanan Aman kepada masyarakat dan pengujian rapid test. Tujuannya dari kegiatan ini untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang keamanan produk obat dan makanan dengan target masyarakat umum, khususnya konsumen cerdas yang peduli dengan keamanan produk obat dan makanan.

SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN PRODUK PANGAN OLAHAN TERKEMAS UNTUK UMK



Kamis, 20 Maret 2025 – Loka POM Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK dalam Rangka UMKM Pangan Menuju Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting selama 1 hari pada tanggal 20 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 20 peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh Kelapa Loka POM Kabupaten Bungo, Bapak Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt beliau menyampaikan bahwa “BPOM mendukung kemajuan Pelaku Usaha UMK untuk meningkatkan kemandirian serta mendukung pelaku usaha yang mau mendaftarkan produknya di BPOM, dengan adanya kegiatan Pendampingan UMK, yaitu DJANGKI OM “Dampingi Jemput bola peNGurusan Konsultasi Izin Edar Obat dan Makanan” diharapkan pelaku usaha yang memerlukan pendampingan secara intensif akan terbantu dengan adanya kegiatan ini”.

Kegiatan ini peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai “Keamanan Pangan (Edukasi Standar Pangan Olahan) dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.. Diharapkan dari kegiatan penyebaran informasi dapat memberikan keseragaman pemahaman yang baik tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Cara menyajikan pangan aman dengan memahami Keamanan Pangan itu sendiri.

PENYEBARAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN LAPAK POM SAPAKAT DI PASAR BEDUK



Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi Obat dan Makanan aman dan LAPAK POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo Senin, 03 Maret 2025. LAPAK POM SAPAKAT merupakan program inovasi Loka POM di Kabupaten Bungo semenjak tahun 2023 guna menjangkau lebih banyak Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Dilaksanakannya Dimana Petugas melakukan pemajangan produk Obat dan Makanan yang Illegal, rusak, dan mengandung bahan berbahaya. Petugas juga memberikan layanan konsultasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkonsultasi terkait Obat dan Makanan Aman. Kegiatan ini diiringi dengan pelaksanaan pengujian sampling bersama tim pengujian untuk pengecekan produk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya di pasar beduk Harapannya pelaksanaan KIE dan Layanan Publik ini dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terkendala jarak untuk mendapatkan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan dan memberikan edukasi serta pengetahuan kepada pengunjung di pasar beduk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

HIGHLIGHT viii

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR GRAFIK.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 17

 1.1 LATAR BELAKANG 17

 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 18

 1.3 STRUKTUR ORGANISASI 20

 1.4 ISU STRATEGIS 25

 1.4.1 ISU INTERNAL 25

 1.4.2 ISU EKSTERNAL..... 27

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 29

 2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA..... 29

 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 33

 2.3 PERJANJIAN KINERJA 34

 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 37

 2.5 METODE PENGUKURAN..... 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 46

 3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA..... 51

 3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 51

 3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo..... 72

 3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo..... 75

 3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu 92

 3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 96

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi
Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja
Loka POM di Kabupaten Bungo 100

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Layanan Publik Loka POM di
Kabupaten Bungo yang Prima 104

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah
Unit Organisasi yang Optimal 109

3.2 *TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI* 122

3.3 *REALISASI ANGGARAN*..... 140

BAB IV PENUTUP 157

1.1 *KESIMPULAN* 157

1.2 *KENDALA* 159

1.3 *REKOMENDASI* 159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025 iii

Tabel 2.Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan 21

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan 21

Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota 22

Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota..... 23

Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS) 23

Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo..... 23

Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo 33

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo 35

Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 38

Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan I Tahun 2025 46

Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 47

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan 1 Tahun 2025..... 51

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Triwulan 1 Tahun 2025 72

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan 1 Tahun 2025 75

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan 1 Tahun 2025 92

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan 1 Tahun 2025.... 100

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan 1 Tahun 2025 105

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 8 Triwulan 1 Tahun 2025 109

Tabel 20. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 141

Tabel 21. Nilai Indeks Efisiensi 146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo..... 20

Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo..... 22

Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo 24

Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Isu Strategis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengawali fase baru pembangunan Nasional yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rpjmn 2025-2029 terkait kesehatan untuk semua. Menjamin akses kesehatan untuk semua dengan memperkuat sistem kesehatan nasional yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. BPOM menghadapi penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dalam penguatan pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Terkait dengan hal tersebut, pangan dan sediaan farmasi merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional.

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan aman berkhasiat/bermanfaat,dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Bungo mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini merupakan tanggungjawab besar bagi Loka POM di Kabupaten Bungo dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi keamanan, mutu yang ketat. Selain bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar dipasaran.Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan,memastikan bahwa masyarakat

Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Pencapaian kegiatan kinerja yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisi secara ringkas dan lengkap menjelaskan capaian kinerja terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi termasuk aspek keuangan yang mana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo triwulan I tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bungo, mengetahui tingkat efektivitas kinerja sesuai dengan Target Rencana Strategis Tahun 2025 dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 4 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana. program. dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal. intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi. informasi. edukasi. dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM pada tahun 2018 telah ditetapkan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai salah satu UPT BPOM yang berfungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami penambahan 2 (dua) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin. Pada 23 April 2024 melalui surat dinas nomor PR.05.03.21.04.24.13 sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan nomor S-39/AG/AG.4/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Pemutakhiran Satker Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi

Loka POM di Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan fungsinya, kantor Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pengadaan sewa gedung yang digunakan sebagai Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dijelaskan Loka POM terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Kelompok

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Bungo sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Pada tahun 2025 Triwulan I pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN berjumlah 16 orang, 2 orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan 5 orang tenaga outsourcing. Latar belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN terdiri dari apoteker sebanyak 4 orang, sarjana sebanyak 10 orang, dan diploma sebanyak 2 orang.

Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No	Status Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		Apoteker	S-1	D-III	SLTA/Sederajat	
1	PNS	4	9	2		15
2	PPPK		1			1
3	PPNP		2			2
4	Petugas Keamanan				3	3
5	Pengemudi				1	1
6	Cleaning Service				1	
Total		4	12	2	4	22

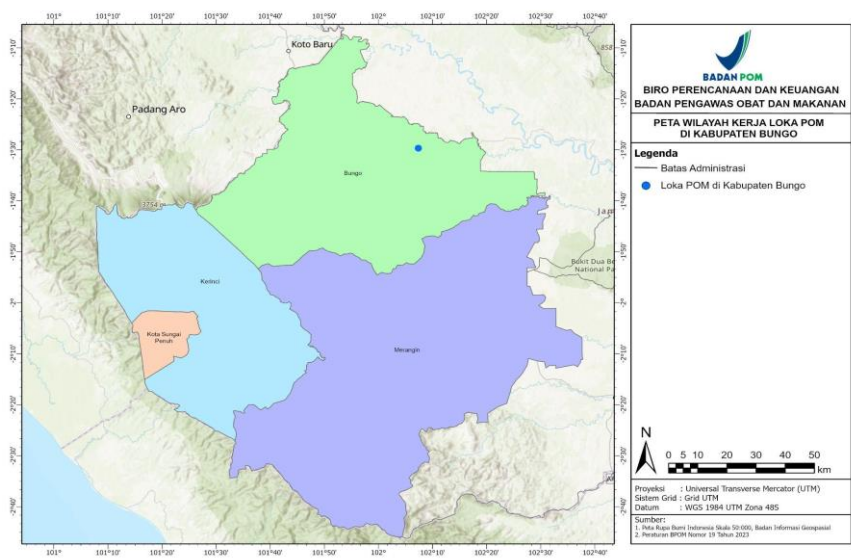
Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Bungo telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	0
3	PFM Ahli Muda	3
4	PFM Ahli Pertama	9
5	Bendahara	1
6	Pranata Komputer	1

7	Pranata APBN	1
Total		16

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km².



Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km²

Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Luas(km ²)
1	Kota Sungai Penuh	391,50
2	Kabupaten Kerinci	3.808,00
3	Kabupaten Bungo	4.659,00
4	Kabupaten Merangin	7.669,00
Total		16.527,50

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 65 kecamatan dan 702 Desa.

Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
3	Kabupaten Bungo	17	141
4	Kabupaten Merangin	24	205
	Total	65	702

Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kota Sungai Penuh	99,2
2	Kabupaten Kerinci	253,9
3	Kabupaten Bungo	373,3
4	Kabupaten Merangin	357,6
	Total	1.084

Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kota Sungai Penuh	6 - 8
2	Kabupaten Kerinci	6 - 8
3	Kabupaten Bungo	1 - 3
4	Kabupaten Merangin	1– 5

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan terbuka

puasa. Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Bungo maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

1.4.1 ISU INTERNAL

a) Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

b) Sumber Daya Manusia

SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan pegawai yang mengemban tugas tidak hanya sesuai keahliannya tetapi juga tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh jabatan tertentu, seperti pengelola kearsipan, pengelola BMN dan perencana, sehingga Loka membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait efektifitas kegiatan Pengawasan Obat dan. Selain itu dengan bertambahnya *catchment area*, dari 2 kabupaten/kota menjadi 4 wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo, sehingga kompleksitas dan keberagaman sarana semakin banyak. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan jumlah pegawai terutama PFM.

c) Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Bungo banyak yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang merangkap, sehingga pengembangan kompetensi menjadi sangat penting. Tanpa kompetensi yang memadai, pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih sulit dan kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan keterampilan agar mereka dapat menjalankan tugas ganda dengan lebih efisien dan profesional.

d) Peningkatan Klasifikasi UPT

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi Balai POM sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini melakukan pengujian komoditas pangan menggunakan metode uji cepat pangan (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk sampel obat pengujian rutin telah dapat dilakukan dengan menggunakan rapid test obat telah dilaksanakan mulai akhir tahun 2024. Namun, untuk sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengujian dilakukan di Balai Regionalisasi. Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mulai melakukan pengujian secara mandiri, meskipun masih terbatas pada beberapa parameter tertentu, diharapkan kapasitas pengujian di Loka POM semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri untuk lebih banyak parameter.

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a) Pengawasan Obat dan Makanan

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kabupaten Bungo dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b) Kejahatan Obat dan Makanan

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kabupaten Bungo dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.

c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Perlu mengoptimalkan sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kabupaten Bungo, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

d) Lokus Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- 2.5 Metode Pengukuran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntut BPOM untuk melakukan perubahan peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Loka POM di Kabupaten Bungo telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Pertimbangan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya.

Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Loka POM di Kabupaten Bungo telah disusun dalam bentuk draft rencana strategis pada tahun 2025 dengan mengacu pada hasil revidi Renstra BPOM. Sasaran strategis ini disusun sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI BADAN POM

Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI yang memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

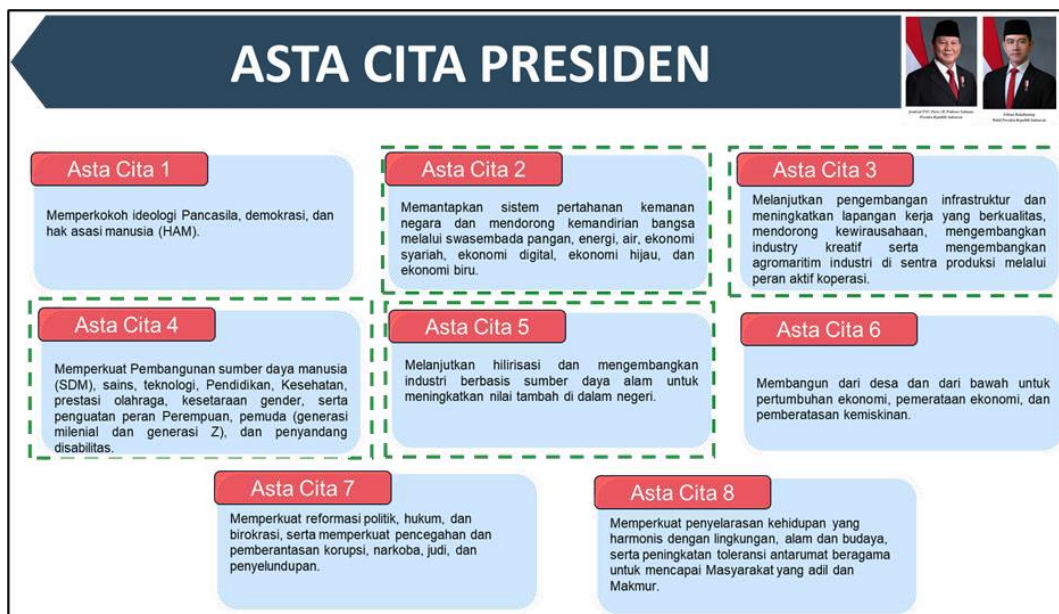
“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”

MISI BADAN POM :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bungo. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada tahun 2025, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 – 2029 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83

	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
	Jumlah desa pangan aman	1
	jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan 85,5
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 93
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar 90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT 4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM 50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 50
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2,55
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan UPT untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo

	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: PERNANDA SAPRYANOKI
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025	
Pihak Pertama Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
 PERNANDA SAPRYANOKI	 TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPDB pangan olahan	85,5 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572,436,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk pelaksanaan kinerja dari masing-masing indikator. Berikut tabel mengenai RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo.

Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	81.008.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81.008.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.259.250
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	56.518.500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	35.295.600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35.295.600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35.295.600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35.295.600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35.295.600
2.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	10	0	0	10.5		0	11	0		11.5	28.259.250
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	92.941.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.875.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.875.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.100.000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	372.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80.651.500
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80.651.500
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	306.000.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.39	864.772.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	648.579.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.55	648.579.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.775.000
Total															3.572.436.000

Kabupaten Bungo, 12 February 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



2.5 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, yaitu:

- 1) Sangat Kurang;
- 2) Kurang
- 3) Butuh Perbaikan
- 4) Baik
- 5) Istimewa

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < \text{NKO} \leq 100$	Baik
	$60 < \text{NKO} < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < \text{NKO} < 60$	Kurang
	$0 \leq \text{NKO} < 20$	Sangat Kurang

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian input}} \quad IE = \frac{100 \%}{100\%} = 1$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

3.3 Realisasi Anggaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing perjanjian kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo. Hal ini bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja, melakukan analisis program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW 1 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	119,4	Tidak dapat disimpulkan 
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	106,70	Sangat Baik 
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	26,12	Kurang 
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	75	Cukup 
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	Tidak dapat disimpulkan 
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	83,32	Cukup 
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	Penilaian di akhir tahun

8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	Baik	
Total Capaian		510,54		
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		85,09		
Predikat NKO		Baik		

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 8 Sasaran Strategis yang diukur capaiannya dengan hasil yaitu 1 Sasaran Strategis perhitungan dilakukan di akhir tahun 2025, 2 Sasaran Strategis termasuk kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, 1 Sasaran Strategis kategori SANGAT BAIK, 1 Sasaran Strategis kategori BAIK, 2 Sasaran Strategis kategori CUKUP, 1 Sasaran strategis kategori KURANG. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai NKO Loka POM di kabupaten Bungo, diperoleh nilai NKO sebesar 85,09% dengan kategori BAIK. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
1 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	99,33	126,54	126,54	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133,33	133,33	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-	-	EXCLUDE PERHITUNGAN TW I -	
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	75	75	100	133,33	133,33	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 

sesuai ketentuan

Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	30	30	100,00	41,67	Baik	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	EXCLUDE PERHITUNGAN TW I				
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	EXCLUDE PERHITUNGAN TW I				
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	86,67	108,34	108,34	Sangat Baik	Tercapai
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	83,19	95,67	115,00	115,00	Tidak dapat disimpulkan	Tercapai
NILAI CAPAIAN SASARAN				119,42	109,7	Tidak dapat disimpulkan	Tercapai
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT	11,5	10	10,67	106,70	92,78	Sangat Baik	Tercapai

di Wilayah Kerja UPT		sesuai Standar Kemampuan Laboratorium							
								106,70	92,78
		NILAI CAPAIAN SASARAN						Sangat Baik	Akan Tercapai
									
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	86,83	90,7	104,46	104,46	Sangat Baik	Tercapai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	25	0	0,00	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
			1	25	0	0,00	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
		Jumlah desa pangan aman						Kurang	Perlu Upaya Keras
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	0	0,00	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
		NILAI CAPAIAN SASARAN						Kurang	Perlu Upaya Keras
									
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5	20	15	75,00	17,54	Cukup	Perlu Upaya Keras
									
		NILAI CAPAIAN SASARAN						Cukup	Perlu Upaya Keras
									

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	0	15	#DIV/0!	16,13	Tidak dapat disimpulkan 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN						#DIV/0!	16,13	Tidak dapat disimpulkan 	Perlu Upaya Keras 
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	41,66	83,32	46,29	Cukup 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN						83,32	46,29	Cukup 	Perlu Upaya Keras 
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
NILAI CAPAIAN SASARAN						0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	10	10	100,00	10	Baik 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN						100,00	10	Baik 	Perlu Upaya Keras 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 5 indikator kinerja kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, 3 indikator kinerja kriteria SANGAT BAIK, 2 indikator kinerja kriteria BAIK, 2 indikator kinerja kriteria CUKUP, 3 indikator kinerja kriteria KURANG, 4 indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun 2025, dan 3 indikator kinerja tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I 2025, maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini dikarenakan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 1 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh hasil rata-rata 119,42 dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan / Tercapai/ Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada table berikut ini :

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	99,33	126,54	126,54	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti	75	75	100	133,33	133,33	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 

sesuai ketentuan							
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-	-	-	-
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100	133,33	133,33	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	30	30	100,00	41,67	Baik 	Perlu Upaya Keras 
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70					
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75					
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	86,67	108,34	108,34	Sangat Baik 	Tercapai 
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	83,19	95,67	115,00	115,00	Tidak dapat disimpulkan 	Tercapai 

NILAI CAPAIAN SASARAN

119,42

109,7

Tidak dapat
disimpulkan

Tercapai



IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,33	126,54	Tidak Dapat Disimpulkan 

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I adalah 99,33% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 126,54% sehingga dikategorikan dengan kriteria capaian **"Tidak Dapat Disimpulkan"**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,33	126,54	Tercapai / Melampaui 

Realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I memiliki capaian 126,54% dengan kategori capaian **"Tidak Dapat Disimpulkan"**

Sampling sediaan farmasi dilakukan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling tahun 2025. Adapun cara perhitungan presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- a) % Obat $= A+B+C+D+E$
- A $= 30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- B $= 20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- C $= 20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total sampel yang diuji} \times 100\%)$
- D $= 20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- E $= 10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$
- b) %OBAOK $= (A+B+C+D+E) / 5$
- A $= (a1 + a2) / 2$
- $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
- $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
- B $= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji}) \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 C &= (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}) \times 100\% \\
 D &= (\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel diperiksa dan diuji}) \times 100\% \\
 E &= (\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\% \\
 \text{c) \% SK} &= (A+B+C+D+E) / 5 \\
 A &= (a1 + a2) / 2 \\
 a1 &= (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\% \\
 a2 &= (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\% \\
 B &= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji}) \times 100\% \\
 C &= (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}) \times 100\% \\
 D &= (\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\% \\
 E &= (\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\% \\
 \text{d) \% Kosmetik} &= (A+B+C+D+E) / 5 \\
 A &= (a1 + a2) / 2 \\
 a1 &= (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/
 \end{aligned}$$

target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

C = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) x 100%

D = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) x 100%

E = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

% Sampel Sediaan Farmasi = %Obat + % OBAOK + %SK + % Kosmetik / 4
Realisasi sampel obat yang telah disampling sebanyak 5 sampel, untuk obat tradisional dan kosmetik masing-masing telah disampling 1 sampel. Sehingga total sampel yang telah disampling sebanyak 7 sampel yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Untuk bulan Februari dan Maret Loka POM di Kabupaten Bungo belum melakukan sampling dikarenakan adanya penyesuaian terkait efisiensi. Sehingga hingga TW I sampel yang telah di sampling sebanyak 7 sampel sediaan farmasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 99,33% dengan capaian kinerja terhadap tahun target 2025 adalah 126,54% yang dikategorikan dalam kriteria capaian **"Tidak Dapat Disimpulkan"**. Hal ini disebabkan karena semua sampel yang disampling pada triwulan I telah

dilaksanakan sesuai ketentuan meskipun ada 1 sampel obat yang melewati *timeline* pengujian tetapi capaian masih sesuai.

Pelaksanaan sampling tahun 2025 dilaksanakan secara regionalisasi. Loka POM di Kabupaten Bungo masuk pada region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru sebagai Balai Koordinator. Region Pekanbaru terdiri dari Jambi, Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Pangkal Pinang. Untuk komoditi sediaan farmasi semua sampel dilaksanakan secara regional, sedangkan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik sebagian regional dan sebagian non regional (pengujian dilakukan ke Balai POM di Jambi). Pada tahun 2025 juga Loka POM di Kabupaten Bungo juga melaksanakan pengujian sampel Obat secara *Rapid Test*. Dalam pelaksanaan teknisnya, regionalisasi pengujian yang sebelumnya dalam tahap penyesuaian sekarang sudah dalam tahap ke yang lebih baik dan terorganisir ditambah untuk sampel obat telah dapat diuji secara *rapid test* untuk sebagian obatnya. Namun beberapa kendala yang masih ada antara lain adanya kebijakan efisiensi yang membuat unit kerja tidak dapat melakukan sampling, ketersediaan reagen pada balai tujuan yang terbatas karena kebijakan efisiensi serta rentang waktu pengujian yang terlampaui singkat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
2. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
4. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

IKU 2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan I sebesar 133,33% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat disimpulkan”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 133,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tercapai/Melampaui”. Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2 sampel.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 133,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan menandakan bahwa dari seluruh sampel pangan olahan yang disampling di triwulan I telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target dari target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT

Indikator ini diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan administrasi sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan setempat. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel pangan dugaan KLB yang terjadi di wilayah Loka akan dikirim ke Balai Penguji, kemudian hasil yang dikeluarkan menjadi kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo meskipun tidak melakukan pengujian.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, tentang Pemberitahuan indikator yang dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Penilaian indikator kinerja ini pada triwulan I 2025 belum dapat dilakukan pengukuran kinerja, maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini dikarenakan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan I sebesar 133,33% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat disimpulkan”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase berisiko sesuai ketentuan	sampel yang ditindaklanjuti	PIRT	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui 

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 133,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tercapai/Melampaui”. Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Realisasi persentase sampel

PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 1 sampel

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 133,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan menandakan bahwa dari sampel PIRT yang disampling di triwulan I telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	30	100	Baik

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 30 dengan capaian terhadap target triwulan I 2025 sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Baik**”.

Nilai persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung berdasarkan :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan : % =
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100 \%$$
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor : % =
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100 \%$$

Hingga akhir TW I 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan/ menerima tindak lanjut dari pemangku kepentingan sebanyak 9 keputusan/ rekomendasi dari 15 keputusan/ rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan untuk tindak lanjut dari lintas sektor belum diterima hingga akhir TW I. Dengan demikian, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100 % dengan kategori “**Baik**”.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		72	30	41,67	Perlu Upaya Keras 

Pada TW I tahun 2025 nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 30 dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 41,67% dengan kategori “**Perlu Upaya Keras**”. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bersifat akumulatif, artinya target setiap bulan akan mengalami kenaikan setiap bulannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian pada TW I ini di karenakan :

- a. Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan
- b. Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha

- c. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- d. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Membuat link bersama terkait hasil pengawasan sarana distribusi yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan setempat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai % capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target/ Baik. Hal ini dilakukan dengan aktif berkoordinasi dengan lintas sektor dan adanya penggunaan link bersama terkait hasil pengawasan untuk dapat diakses oleh *Stakeholders*.

IKU 6. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, tentang Pemberitahuan indikator yang dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Penilaian indikator kinerja (IKU 6) Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I 2025 belum dapat dilakukan, maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini dikarenakan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

IKU 7. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, tentang Pemberitahuan indikator yang dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Penilaian indikator kinerja (IKU 7) Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I belum dapat dilakukan, maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hal ini dikarenakan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 86,67 % sudah mencapai capaian kinerja terhadap target TW I sebesar 80 dengan capaian 108,34% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian **“Sangat Baik”**.

Nilai Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari (a+b+c):

- pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Hingga akhir TW I, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 9 sarana. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan intensifikasi pengawasan pangan Ramadhan dan menjelang idul fitri 1446 H.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	Tercapai / Melampaui 

Pada TW I tahun 2025 nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 86,67 dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target sebesar 108,34% dengan kategori capaian “**Tercapai/Melampaui**”. Target Indikator Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat, artinya target setiap bulan sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa penyebab tercapainya target IKU persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

- Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat disetiap bulannya.
- Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut Pangan Olahan.
- Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bitl.ly internal serta surat tindak lanjut.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, seperti Food Inspector Dasar/Muda/Madya, Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan lain terkait pangan olahan.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan.
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa)

IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	95,67	115	Tidak dapat disimpulkan

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 95,67% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 115% dengan kategori capaian "**Tidak dapat disimpulkan**".

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	95,67	115	Tercapai / Melampaui 

Realisasi presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 95,67% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 115% dengan kategori capaian **"Tercapai/Melampaui"**.

Pengawasan iklan dilaksanakan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pangan Olahan. Adapun cara perhitungan presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- a) % Obat = $(A+B)/2$
 A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak) x 100%
 B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi) x 100%
- b) % OBAOK = $(A+B+C)/3$
 A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- c) % SK = $(A+B+C)/3$
 A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- d) % Kosmetik = $(A+B)/2$

- A = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- B = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- e) % PO = A+B+C
- A = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- B = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- C = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

$$\% \text{ iklan sediaan farmasi dan pangan olahan} = \% \text{Obat} + \% \text{OBAOK} + \% \text{SK} + \% \text{Kosmetik} + \% \text{PO} / 5$$

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I terhadap tahun 2025 adalah 95,67% dengan capaian kinerja terhadap target Tahun 2025 sebesar 115% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**

Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin b, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan masih sesuai ketentuan walau pun masih ada iklan yang masih berbeda penilaian dengan pusat. Kesesuaian dengan pusat juga menjadi penilaian dalam pengawasan iklan ini. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan iklan sesuai dengan

pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

- 1. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 2 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 106,70 dengan kriteria “Sangat Baik / Tercapai/ Melampaui” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar	11,5	10	10,67	106,70	92,78	Sangat Baik	Tercapai



Kemampuan
Laboratorium

106,70

92,78

Sangat Baik

Akan
Tercapai

NILAI CAPAIAN SASARAN

**IKU 10. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung menggunakan form dan rumus Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang diberikan oleh PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. LOKA POM di Kabupaten Bungo dalam tingkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yaitu pada tier/tingkat 1.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1, dapat dihitung berdasarkan rumus $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

- Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10,67	106,70	Sangat Baik

Pada triwulan I tahun 2025 realisasi IKU ini diperoleh 10,67, dengan capaian 106,7, dengan kriteria Sangat Baik. Rincian perolehan nilai pemenuhan lab Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Standar Ruang Lingkup 6,40, Standar Peralatan 12,5, dan Standar Kompetensi Laboratorium 40.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	10,67	92,78	Akan Tercapai 

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I 10,67 dibandingkan dengan target akhir tahun 11,5, nilai capaian sebesar 92,78 dengan kriteria Akan Tercapai. Pada triwulan I telah melaksanakan sampel rutin terhadap sampel obat yang telah dilakukan verifikasi metode acuan pada tahun 2024. Verifikasi MA pada tahun 2024 dapat menjadi baseline pada triwulan I 2025 ini.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya keberhasilan nilai pemenuhan laboratorium pada triwulan I 2025 ini dikarenakan adanya perencanaan yang dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan, baik pada Strandar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium, kemudian adanya komitmen dari petugas laboratorium untuk pemenuhan SKL, dan dengan

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kebutuhan pemenuhan laboratorium SKL.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pemenuhan SKL ini dengan melakukan

- 1. Pemetaan dan perencanaan setiap bulan, triwulan, hingga tahunan agar menggambarkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU ini,
- 2. Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan berkelanjutan
- 3. Melakukan pengadaan reagen, test kit dan alat gelas yang sesuai kebutuhan agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 26,12 dengan kriteria “Kurang / Perlu Upaya Keras” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi				Kategori Terhadap Target		
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025	
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	86,83	90,7	104,46	104,46	Sangat Baik 	Tercapai 
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	25	0	0,00	0,00	Kurang 	Perlu Upaya Keras 	

Jumlah desa pangan aman	1	25	0	0,00	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	0	0,00	0,00	Kurang	Perlu Upaya Keras
NILAI CAPAIAN SASARAN				26,12	26,12	Kurang	Perlu Upaya Keras

IKU 11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja			Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE	sediaan farmasi dan pangan	olahan diwilayah kerja UPT	86,83	90,7	104,46	Sangat Baik

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survey dengan target masyarakat yang terpapar KIE baik melalui tatap muka maupun media pada bulan berjalan. Survey Efektitas KIE tahun 2025 terdiri dari survey Tatap Muka dan Survey Media, dimana indikator dari survey keduanya yaitu:

Indikator Survey Tatap Muka :

- Narasumber/Petugas
- Konten/Informasi
- Pemahaman Audiens
- Manfaat

Indikator survey Media

- Sumber Informasi
- Konten/Informasi

- c. Pemahaman Audiens
- d. Manfaat

Untuk responden yang ditetapkan ada ketentuan dari perhitungan target KIE tahunan, untuk tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki target peserta KIE sebanyak 95 Orang dengan target survey sebesar 86,83 disetiap triwulan.

Pada triwulan pertama ini, sudah diadakan kegiatan KIE berupa kegiatan penyebaran informasi dan lapak pom sapakat di pasar beduk kabupaten bungo dengan Teknik Face to Face pada tanggal 03 Maret 2025, dan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting tanggal 20 Maret 2025. Nilai Capaian yang diperoleh pada triwulan pertama mencapai target sebesar 90,7 dengan capaian 104,46% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan masing-masing perolehan sebesar 90,081 (Tatap Muka) dan 91,319(Media).

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun	Realisasi	%	Kategori
			2025	TW I	Capaian	
Tingkat Efektivitas KIE	sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT		86,83	90,7	104,46	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE triwulan I tahun 2025 mencapai target dengan kategori terlampaui, dan perlunya usaha dan strategi yang diterapkan untuk tahun 2025 agar capaian terus melampaui target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan Analisa dari capaian keberhasilan dari nilai indeks efektifitas KIE adalah adanya perencanaan yang sudah dibuatkan dari awal walaupun terkendala dengan anggaran yang masih terblokir. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dialihkan dengan daring dan jemput bola di tempat publik (KIE *Face to Face*). Perencanaan juga dilakukan pada KIE media dimana semua petugas wajib membuat postingan setiap bulannya sesuai tema yang ditentukan.

Dari semua perencanaan akan dimonitoring setiap triwulannya agar dapat di evaluasi dan ditindaklanjuti apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Selain perencanaan, Sumber Daya Manusia yang kompeten juga menunjang dari keberhasilan capaian ini, semua personil dan petugas Loka POM di Kabupaten Bungo dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam realisasi pada triwulan I ini.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya Planning Of Action (PoA) pada KIE Tatap Muka dan KIE Media.
2. Kegiatan penyebaran informasi dan lapak pom sapakat di pasar beduk kabupaten bungo dengan Teknik Face to Face pada tanggal 03 Maret 2025
3. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting tanggal 20 Maret 2025
4. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat.
5. Memaksimalkan KIE Media Sosial dan Media Elektronik.

IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi kemanana pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanann pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi pada tahun 2024 adalah 1 (satu) sekolah dengan 12 (dua belas) sekolah yang harus mendapatkan perluasan untuk dilakukan sosialisasi.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0	Kurang

Realisasi jumalh sekolah dengan dilakukan intervensi keamanan pangan sekolah / Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Triwulan I dengan kategori Kurang, hal ini disebabkan karena kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah di Kabupaten Bungo belum selesai dilaksanakan di bulan Maret. Terjadi Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah ini menghambat kegiatan advokasi yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret. Berdasarkan rapat awal dengan pemerintah daerah, direncanakan advokasi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	25	0	Perlu Upaya Keras 

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**, hal ini disebabkan karena target indikator ini bersifat kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Dan diusahakan untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan II, karena Kepala Daerah yang ditetapkan untuk dilakukan Intervensi Keamanan Pangan akan dilantik pada Bulan Mei 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 (satu) Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Kabupaten yang akan dilakukan intervensi adalah Kabupaten Bungo.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan Indikator kinerja baru yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025.

Pada Prinsip KAK Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan akan melaksanakan tahapan Advokasi Lintas Sektor PJAS, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader PKP Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan.

Pada tahapan audiensi/advokasi Loka POM akan melaksanakan koordinasi lintas sektor kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus sekolah yang telah didahului dengan survey pasar.

Pada tahapan sosialisasi keamanan pangan sekolah, dilaksanakan sosialisasi aktif peasan keamanan pangan sekolah kepada komunitas. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Adapun komunitas sekolah yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader sekolah. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow.

Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim Loka POM di Kabupaten Bungo. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan

mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 2 (dua) sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Bungo. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang. Pada tahun 2024 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. Loka POM di Kabupaten Bungo sangat bersyukur dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo.

Agar tahapan kegiatan PJAS di triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader

2. Melaksanakan rapat pembahasan awal untuk seluruh UPTD yang ikut dalam program sekolah yang membudayakan keamanan pangan agar diperoleh sekolah yang aktif untuk melaksanakan dan mengembangkan program ini
3. Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus yang dipilih untuk dijadikan role model
4. Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah
5. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawalan kegiatan ini.
6. Melakukan pemantauan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan UPT

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan karena adanya pemilihan umum (pemilu) untuk kepala daerah dan di Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten yang ditunjukan untuk melaksanakan Lokus melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sehingga dari hasil rapat awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan advokasi setelah PSU dan Penetapan Kepala Daerah terpilih pada bulan Mei 2024. Dikarenakan penundaan jadwal kegiatan ini, maka Loka POM di Kabupaten Bungo harus mempercepat dan mengoptimalkan kegiatan pada periode triwulan II tahun 2025.

Efisiensi anggaran yang terjadi pada RO ini juga menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan dengan mengubah konsep kegiatan tersebut. Sebagai langkah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo akan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring sehingga tidak membutuhkan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi secara daring juga sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah SDM yang ada sehingga tetap dapat menjangkau lebih banyak audience.

Sosialisasi diberikan kepada komunitas sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, orang tua siswa, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Untuk keberhasilan program PJAS ini dalam jangka panjang diperlukan Kerjasama dan kolaborasi semua pihak termasuk para PKL di sekitar sekolah. Mereka harus diberikan pemahaman sehingga hanya akan menjual pangan yang aman.

IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0	Kurang 

Realisasi persentase tahapan kegiatan desa aman hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Triwulan I dengan kategori Kurang, hal ini disebabkan karena kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah di Kabupaten Bungo belum selesai dilaksanakan di bulan Maret. Terjadi Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah ini menghambat kegiatan advokasi yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret. Berdasarkan rapat dengan pemerintah daerah, direncanakan advokasi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Jumlah desa pangan aman	1	25	0	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hinggna triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras, hal ini disebabkan karena target indicator ini bersifat kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. dan diusahakan untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan II, karena Kepala Daerah yang ditetapkan untuk dilakukan Intervensi Keamanan Pangan akan dilantik pada Bulai Mei 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 1 kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang baru dilaksanakan di Tahun 2025 oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. UPT akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas desa yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel, pelaku usaha warung siap saji, PKK/keluarga, sekolah dan Karang Taruna/remaja. Agar tahapan kegiatan Desa Pangan Aman di triwulan

berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dijalankan dengan optimal
2. Melaksanakan rapat pembahasan awal untuk seluruh UPTD yang ikut dalam program desa pangan aman untuk menentukan desa yang sesuai dengan kriteria lomba desa keamanan pangan agar dikemudian hari mudah untuk ikut dalam lomba desa pangan aman yang diadakan secara nasional
3. Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus yang dipilih untuk dijadikan role model
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader
5. Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah
6. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawalan kegiatan ini.
7. Melakukan pemantauan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan UPT

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Desa Pangan pada triwulan I tahun 2025 hampir sama dengan PJAS yang belum dilaksanakan karena adanya pemilihan umum (pemilu) untuk kepala daerah dan di Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten yang ditunjukan untuk melaksanakan Lokus melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sehingga dari hasil rapat awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan advokasi setelah PSU dan Penetapan Kepala Daerah terpilih pada bulan Mei 2024. Dikarenakan penundaan jadwal kegiatan ini, maka Loka POM di

Kabupaten Bungo harus mempercepat dan mengoprimalkan kegiatan pada periode triwulan II tahun 2025.

IKU ini pun terkena dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan dengan mengubah konsep kegiatan tersebut. Sebagai langkah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo akan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring sehingga tidak membutuhkan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi secara daring juga sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah SDM yang ada sehingga tetap dapat menjangkau lebih banyak audience.

Komunitas yang diintervensi pada program ini yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung,

pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas

sekolah, pondok pesantren, dll

Kegagalan kegiatan ini mungkin saja terjadi mengingat UPT baru saja melaksanakan kegiatan ini di tahun 2025, sehingga masih banyak pembelajaran dari petugas yang perlu ditingkat baik dari tahapan kegiatan maupun pelaporan kegiatan. Untuk menunjang keberhasilan program tersebut petugas Loka POM di Kabupaten Bungo perlu mengadakan study tiru ke Balai POM di Jambi dan melaksanakan koordinasi yang lebih intensif agar mendapatkan pendampingan dari BPOM Pusat, Balai POM di Jambi dan UPT lainnya. Dukung dari Kepala Loka POM sangat diperlukan untuk optimalisasi kegiatan advokasi dengan pemerintah terkait.

IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	0	Kurang



Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target Triwulan I dengan kategori **Kurang**, hal ini disebabkan karena kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah di Kabupaten Bungo belum selesai dilaksanakan di bulan Maret. Terjadi Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah ini menghambat kegiatan advokasi yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret. Berdasarkan rapat awal dengan pemerintah daerah, direncanakan advokais akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	0	Perlu Upaya Keras



Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 0 % dengan kategori Perlu Upaya Keras. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Dan diusahakan untuk mengejar target tahunan ini pada Triwulan II, karena Kepala Daerah yang ditetapkan untuk dilakukan Intervensi Keamanan Pangan akan dilantik pada Bulai Mei 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 kabupaten di Kabupaten Bungo. Pasar Aman Berbasis merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun

sebelumnya dengan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, survei pasar, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Pada Triwulan I Tahun 2025, progres program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah pengawalan terhadap pasar yang sudah diintervensi. Kegiatan pengawalan yang telah dilaksanakan adalah penyebaran produk informasi keamanan pangan kepada pasar serta mengikutsertakan kader dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM RI agar pengetahuan kader keamanan pangan tetap terjaga dan meningkat. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan pemerintah daerah dan masih menunggu informasi penjadwalan untuk kegiatan audiensi, karena menyesuaikan dengan agenda kepala daerah yang masih padat.

Agar tahapan kegiatan Desa Pangan Aman di triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga di akhir tahun semua tahapan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi lebih awal dan intensif dengan pemerintah daerah
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus kegiatan yang dapat dijadikan role model
3. Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan
4. Mendorong pemda untuk meningkatkan dalam mengawal kegiatan

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pasar Pangan Aman merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program

yang sama tahun sebelumnya. Target triwulan I Tahun 2025 yaitu terlaksananya kegiatan audiensi dan survey terhadap 1 pasar.

Program Desa Pangan Aman pada triwulan I tahun 2025 yang belum dilaksanakan karena adanya pemilihan umum (pemilu) untuk kepala daerah dan di Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten yang ditunjukan untuk melaksanakan Lokus melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sehingga dari hasil rapat awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan advokasi setelah PSU dan Penetapan Kepala Daerah terpilih pada bulan Mei 2024. Dikarenakan penundaan jadwal kegiatan ini, maka Loka POM di Kabupaten Bungo harus mempercepat dan mengoptimalkan kegiatan pada periode triwulan II tahun 2025.

IKU ini pun terkena dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan dengan mengubah konsep kegiatan tersebut. Sebagai langkah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo akan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring sehingga tidak membutuhkan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan sosialisasi secara daring juga sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah SDM yang ada sehingga tetap dapat menjangkau lebih banyak audience.

Kegagalan kegiatan ini mungkin saja terjadi mengingat UPT baru saja melaksanakan kegiatan ini di tahun 2025, sehingga masih banyak pembelajaran dari petugas yang perlu ditingkat baik dari tahapan kegiatan maupun pelaporan kegiatan. Untuk menunjang keberhasilan program tersebut petugas Loka POM di Kabupaten Bungo perlu mengadakan study tiru ke Balai POM di Jambi dan melaksanakan koordinasi yang lebih intensif agar mendapatkan pendampingan dari BPOM Pusat, Balai POM di Jambi dan UPT lainnya. Dukung dari Kepala Loka POM sangat diperlukan untuk optimalisasi kegiatan advokasi dengan pemerintah terkait.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 4 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 75 dengan kriteria **“Cukup / Perlu Upaya Keras”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	85,5	20	15	75,00	17,54	Cukup 	Perlu Upaya Keras 
					75,00	17,54	Cukup 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN								

IKU 15. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	20	15	75	Cukup 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase UMKM yang memenuhi rekomendasi sertifikat = $(A + B + C) / 3$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$C = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Loka POM Kabupaten Bungo hanya memiliki target pendampingan pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 5 sarana. Adapun berikut tahapan pendampingan produk pangan olahan:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan	Jan – Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	30
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5

Pada triwulan 1, telah dilaksanakan 2 tahapan kegiatan yaitu, Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK pangan olahan target dengan bobot capaian sebesar 15%. Adapun, pada triwulan 1 capaian telah sesuai dengan target tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PMPU PO. Namun, terdapat perbedaan dengan target TW 1 yang telah ditetapkan oleh

UPT, hal ini karena adanya perubahan tahapan target pada kegiatan pendampingan pangan olahan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			85,5	15	17,54	Perlu Upaya Keras 

Pada target tahun 2025 persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 85,5% dengan persentase capaian dan kategori terhadap tahun 2025 sebesar 17,54% dengan kategori “**Perlu Upaya Keras**”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian di TW 1 tahun 2025, telah diperoleh capaian progress tahapan sebesar 17,54%, hal ini dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan telah dilakukan sesuai timeline. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK Pangan Olahan. Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan telah dilakukan melalui daring. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah UMKM yang berasal dari wilayah kerja UPT, dari kegiatan ini dapat menjadi gambaran UMKM yang akan mengikuti program pendampingan oleh Loka

POM. Namun, karena efisiensi anggaran sebanyak 87,94%, sehingga kegiatan dialihkan secara daring, kurang berdampak kepada pelaku usaha, sebagian pelaku usaha tidak fokus dan tampak kurang tertarik saat pelaksanaan kegiatan karena sambil melaksanakan kegiatan harian. Namun, dengan itu tidak menutupi minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk di BPOM.

Banyaknya pelaku usaha yang berkonsultasi, menunjukkan bahwa banyak UMK yang berpotensi untuk mendaftarkan produksinya di BPOM. Namun, sayangnya tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen tinggi serta pengetahuan yang cukup tentang pendaftaran di Badan POM. UMK kebanyakan juga tidak memahami teknologi, sehingga sebagian besar pelaku usaha bergantung kepada petugas Loka POM. Namun, dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran petugas Loka POM tidak dapat mendampingi pelaku usaha terus secara langsung, padahal pelaku usaha lebih paham dan terbantu bila di damping secara langsung.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Loka POM Kabupaten Bungo juga memiliki program inovasi pendampingan UMKM yaitu, “DJANGKI OM” (Dampingi Jemput bola peNGurusan Konsultasi Izin Edar Obat dan Makanan) kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan secara intensif oleh Loka POM Kabupaten Bungo. Pendampingan UMKM dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*, sehingga pelaku usaha UMKM dapat kapanpun menerima pendampingan dari Loka POM walaupun tidak sedang berada di daerah bungo dan sekitarnya.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk pelaku usaha, termasuk melakukan evaluasi pre-test dan post agar dapat mengetahui pemahaman pelaku usaha

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 5 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 0 dengan kriteria “Cukup / Perlu Upaya Keras” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 5 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	0	15	0	16,13	Tidak dapat disimpulkan 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN							Tidak dapat disimpulkan 	Perlu Upaya Keras 

IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	0	15	-	Tidak dapat disimpulkan 

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 15. Capaian nilai terhadap target Triwulan I Tahun 2025 adalah ~ **(tidak terdefinisi)**. Hal ini dikarenakan pada Triwulan I Tahun 2025 targetnya adalah 0 namun realisasinya adalah 15 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak dapat disimpulkan”. Hal ini terjadi karena pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* sampai dengan tahapan SPDP.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	93	15	16,13	Perlu Upaya Keras 

Berdasarkan indikator kinerja, target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 93, dengan realisasi sebesar 15 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 16,13%. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan kriteria penilaiannya adalah “Perlu Upaya Keras”. Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan setiap tahapan perkara, sehingga penilaian sesuai target tahunan akan terlihat hasilnya saat pada triwulan 4 atau akhir penyerahan tersangka dan barang bukti. Sampai saat ini masih perkara masih berproses sesuai dengan tahapannya dan *on the track*. Hal ini memperlihatkan adanya perbaikan dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terjadi karena:

- Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan. Saat ini Loka POM Kabupaten Bungo memiliki 2 orang PPNS yang baru dilantik di Tahun 2023.

- Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin profesional dalam melakukan serangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan keterangan hingga dilakukannya penindakan.
- Koordinasi yang terjalin baik dengan *Criminal Justice System* seperti Kepolisian setempat yaitu Polres Bungo, Polres Merangin dan Polres Kerinci selaku korwas PPNS yang memberikan bantuan teknis dan taktis di lapangan maupun proses penyidikan. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Setempat seperti Kejaksaan Negeri Bungo, Kejaksaan Negeri Merangin dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait proses pemberkasan perkara. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bungo, Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Bea Cukai Jambi dan lintas sektor terkait.
- Telah dilakukan penanganan perkara secara *pro justitia* terhadap 1 (satu) kasus obat-obat tertentu dengan tersangka sebanyak 3 (tiga) orang yang saat ini sudah diterbitkan SPDP dan masih dalam proses penyidikan.

Walaupun capaian kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan I Tahun 2025 telah berhasil melebihi target Triwulan I, tetapi masih terdapat juga kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan Sebagian besar anggaran penindakan diblokir dan menyebabkan terbatasnya ruang gerak proses tercapainya target output.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tindak pidana obat dan makanan merupakan tindak kejahatan terorganisir sehingga merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari obat dan makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan. Loka POM di Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan offline maupun online, melakukan penelusuran dan pendalaman

informasi terhadap produk obat dan makanan yang tren peredarannya mulai beralih ke arah digital.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 6 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 83,32 dengan kriteria “Cukup / Perlu Upaya Keras” Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan 1 Tahun 2025

			Realisasi				Kategori Terhadap Target		
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	41,66	83,32	46,29	Cukup 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN						83,32	46,29	Cukup 	Perlu Upaya Keras 

IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
100				

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	41,67	83,33	Cukup 
--	----	-------	-------	---

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**

Untuk penilaian tingkat keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Dengan pertimbangan keterangan sebagai berikut:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 41,67. Capaian nilai terhadap target Triwulan I Tahun 2025 adalah 83,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Cukup”**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			90	41,67	46,29	Perlu Upaya Keras 

Nilai realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 41,67. Capaian nilai terhadap target Triwulan I Tahun 2025 adalah 83,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Cukup”**.

Berdasarkan indikator kinerja, target persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 93, dengan realisasi sebesar 41,67 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 46,29%. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan kriteria penilaiannya adalah **“Perlu Upaya Keras”**. Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan setiap tahapan pelaporan dan penilaian yang berkelanjutan, sehingga penilaian sesuai target tahunan akan terlihat hasilnya saat pada Triwulan IV Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tentu saja terjadi karena:

- Tren masyarakat saat ini mulai beralih ke arah digital, sehingga staf penindakan secara aktif melakukan pemantauan peredaran obat dan makanan di media online melalui pelaksanaan kegiatan patroli siber. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum seluruhnya pernah mengikuti diklat intelijen dasar, analisis, penggalangan maupun siber.
- Penyesuaian system kerja karena adanya perubahan susunan anggota tim fungsi penindakan.

- Pelaporan patrol siber Bulan Januari-Maret 2025 dan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-Februari 2025 yang tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan di Bulan Maret 2025 (pelaporan NIHIL) dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 ditunjang melalui pelaksanaan program Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, antara lain melalui kegiatan:

1. Kegiatan Peningkatan kompetensi petugas. Pelatihan terhadap penjejakan digital dan anailisis kejahatan yang diadakan oleh BPOM RI secara daring maupun luring.
2. Adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan meskipun aplikasi seringkali bermasalah dan eror.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo yang Prima

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 7 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 0. Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
7 Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	-	-
NILAI CAPAIAN SASARAN					0,00	0	-	-

IKU 18. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Triwulan I Tahun 2025 belum bisa dihitung karena belum ada penilaian dan evaluasi kinerja dari Indeks Pelayanan Publik pada triwulan I tahun 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	4,4	-	-	-

Realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya belum dilakukan penilaian hasil Indeks Pelayanan Publik pada triwulan I tahun 20245

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan Loka POM di Kabupaten Bungo untuk mendapat kategori penilaian “Pelayanan Prima”, yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1. Membentuk SK Tim Penilaian Indeks Pelayanan Publik
2. Melakukan pembagian jobdesk untuk masing-masing point penilaian pada aplikasi sapa apip
3. Melaksanakan persiapan pada awal tahun sehingga pada saat penilaian, hanya tinggal mengumpulkan data dukunganya saja.
4. Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap tahun, dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
5. Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
6. Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
7. Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll

8. Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu dilakukan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
9. Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
10. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan
11. Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.
12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas coffee corner, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
13. Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik
14. Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
15. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.

16. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang penilaian pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh tim untuk menjalankan jobdesk dan mengumpulkan data dukung tepat waktu sehingga pengunduhan data dukung ke aplikasi evortal dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pemenuhan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar memenuhi setiap kriteria indeks pelayanan publik yang akan dilakukan penilaian.

Inovasi dalam peningkatan pelayanan public sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

Terdapat beberapa inovasi yang mendukung dalam pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu : LAPAK POM SAPAKAT untuk layanan ULPK kepada Masyarakat yang lebih dekat, Djangki OM untuk peningkatan waktu pelayanan UMKM yang mendaftarkan izin edar dan Kanti Cedik merupakan inovasi yang memanfaatkan aplikasi WA video call dan zoom untuk memudahkan Masyarakat mendapat informasi dan pelayanan.

Kegagalan program ini mungkin terjadi jika program pelayanan publik dilaksanakan tetapi tidak disertai dengan dokumentasi yang lengkap sehingga pada saat penilaian dan evaluasi data yang akan dinilai menjadi tidak lengkap. Selain itu, kegiatan pelayanan public yang tidak konsisten menyebabkan indeks kepuasan dari masyarakat menjadi menurun dan berakibat pada penurunan indeks pelayanan publik.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 8 terhadap target Triwulan I 2025 diperoleh rata-rata 100 dengan kriteria **“Baik / Perlu Upaya Keras”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 8 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 1 2025	Realisasi	%Capaian TW 1 2025	%Capaian 2025	TW 1 2025	Tahun 2025
8 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	-	-
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	-	-
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	10	10	100,00	10	Baik 	Perlu Upaya Keras 
NILAI CAPAIAN SASARAN					100,00	10	Baik 	Perlu Upaya Keras 

IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM**a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan**

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	-	0	0	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;

6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;

7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW I dengan Target TW I belum dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja			Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	% Capaian	Kategori
Nilai	AKIP	UPT	78,39	0	0	-
BPOM						

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW I dengan Target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan pada hasil evaluasi tahun 2024 nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 77,39 kategori “sangat Baik”, sehingga Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja TW, tahunan, dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan

pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil monev tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai AKIP ditentukan oleh adanya perencanaan kinerja (bobotnya = 24), pengukuran kinerja (bobotnya = 24), pelaporan kinerja (bobotnya = 12), monitoring dan evaluasi kinerja (bobotnya = 20) yang baik serta adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya (bobotnya = 20).

Sebagai upaya untuk pencapaian target indikator Nilai AKIP pada periode penilaian pada Triwulan IV, langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Membuat perencanaan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP
- 2) Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam hal penilaian AKIP UPT.
- 3) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran setiap bulan
- 4) Mereviu SOP Monitoring dan Evaluasi
- 5) Komitmen pegawai di loka POM di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi sakip sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai disetiap sasaran strategis dan indikator kerjanya

IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk IKPA antara lain:

- 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- 7) Capaian Output (bobot 25%)
- 8) Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4

90,01 s.d 100	Sangat Baik	5
---------------	-------------	---

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	0	0	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada TW I dengan Target TW I belum dapat dilakukan karena penilaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM oleh Badan POM di akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	-	-

Target tahun 2025 adalah 5 dan realisasi triwulan I 2025 belum bisa dihitung karena pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada triwulan IV.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada TW berikutnya:

- 1) Melakukan penyesuaian RPD berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan SE dari Kementerian Keuangan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak *stakeholder* terkait, yaitu KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan penyesuaian RPD maksimal tanggal 10 di awal TW berikutnya atau sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan mengenai batas waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan revisi Hal III DIPA, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan monitoring secara berkala, melakukan rapat evaluasi kegiatan setiap awal bulan serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku pihak *stakeholder* eksternal.

IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	0	0	-

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi, antara lain:

- a) *Risk Naïve* : Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan

- b) *Risk Aware* : Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
- c) *Risk Defined* : Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
- d) *Risk Managed* : Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
- e) *Risk Enabled* : Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. Serta menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17- 32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>

<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 0 dan realisasinya juga 0. Hal ini dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	-

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target triwulan dengan target tahunnya belum dapat dilakukan.

Hal ini karena pengukuran penilaian Manajemen Risiko dilakukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Bersdasarkan Surat dari Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.06.07.7.12.24.739 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Loka POM di Kabupaten Bungo dapat dikategorikan *Risk Aware*. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2024 adalah 2,500 mengalami peningkatan sebanyak 0,594 dibandingkan Tahun 2023 yaitu 1,906. Hal ini dikarenakan pembaharuan dan kerja sama tim Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Bungo yang berkomitmen melaksanakan pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Ketegori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	10	100	Baik

Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bungo diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Loka POM dilaksanakan dengan penilaian mandiri oleh UPT dengan rencana aksi dan realisasi kegiatan. Penilaian RB Loka POM di Kabupaten belum berdasarkan hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	10	10	Perlu Upaya Keras 

Realisasi Rencana aksi RB tahunan dilaksanakan dengan sistem progres, sehingga pada triwulan I implementasi rencana aksi Reformasi di Loka POM di Kabupaten Bungo masih berada pada progress 10% sesuai dengan yang telah ditargetkan, tetapi pada kategori **Perlu Upaya Keras**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program Reformasi Birokrasi ini bisa terlaksana jika pimpinan memberikan pembinaan dalam pencapaian target masing-masing POJKA dari setiap SKP yang diberikan ke pegawai. Selain itu, ketua Reformasi Birokrasi juga harus rutin dalam memonitoring rapat evaluasi triwulan untuk memantau pencapaian rencana aksi reformasi birokrasi. Realisasi TW I baik dikarenakan target yang telah ditetapkan oleh tim dijalankan dengan baik oleh setiap petugas. Selain itu, penetapan rencana aksi RB didalam SKP pegawai menjadi faktor yang sangat penting dalam pencapaian target triwulan yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini dikarenakan, setiap pegawai Loka POM di Kab. Bungo merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk dapat menyelesaikan program RB pada SKP masing-masing pegawai.

Kegagalan dalam pelaksanaan RB juga dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat pemahaman penerapan RB pada level Loka POM. Hal ini dikarenakan belum ada target pasti dalam penerapan RB di wilayah UPT. Dalam hal ini, ketua RB telah melakukan penyusunan rencana RB terbaru sesuai dengan arahan pusat pada RB tematik dan RB general. Diharapkan pada TW I pimpinan dan seluruh tim RB sudah dapat merencanakan penetapan untuk melaksanakan RB general dan tematik ini.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada evaluasi yang dilaksanakan melalui pemahaman pegawai Loka POM di Kab. Bungo masih terdapat satu orang petugas yang belum memahami terkait RB sehingga pada TW I ini untuk menunjang keberhasilan program kinerja RB maka dilaksanakan sosialisasi RB untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait RB general dan tematik yang akan dilaksanakan

selanjutnya. Setelah dilaksanakan sosialisasi akan dilaksanakan evaluasi pegawai terhadap tingkat pemahaman pegawai, sehingga dapat dipantau sampai sejauh mana tingkat pemahaman pegawai terhadap implementasi RB di lingkungan Loka POM di Kab. Bungo.

Keberhasilan pencapaian program kinerja reformasi birokrasi tahun 2025 dapat dilakukan karena pimpinan unit yang telah memasukan program rencana aksi dari reformasi birokrasi dalam SKP masing-masing pegawai sehingga pegawai memiliki kesadaran dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja UPT. Setelah pimpinan menetapkan SKP, pegawai harus memiliki peran aktif dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan tugas perbaikan dalam reformasi birokrasi. Kegiatan ini akan dipantau oleh Ketua RB melalui whatsapp group. Selain itu, tim RB akan melaksanakan rapat pada awal tahun. Pelaksanaan rapat pada awal tahun dapat memantau kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RB sehingga dapat disusun upaya pencegahan agar program tersebut tidak terlaksana.

Sebagai bukti pencapaian program kerja reformasi birokrasi masing-masing petugas akan mengupload dokumen pendukung ke link <https://bit.ly/rblokabungo2025>. Dengan pemantauan menggunakan link tersebut Ketua Tim RB dapat melihat POKJA mana yang belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang telah ditetapkan di awal tahun.

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 telah tercapai, dikarenakan data dukung dari pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi telah dikumpulkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing fungsi. Sehingga tidak ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi		Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum	
						Rencana Aksi yang Belum Selesai Timeline	
1	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	TW II 2025	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional		Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW II 2025	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling		Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional

3	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaporan monitoring belum dilakukan secara rutin	Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan pusat secara intensif di sarana sediaan farmasi yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	TW II	Aktif melaksanakan monitoring disetiap sarana sediaan farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Monitoring telah dilaksanakan		
4	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). target Pangan Olahan 4 sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Penyesuaian renlak sampel	TW II	Progress
5	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	TW II	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional	Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan		
6	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW II	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta	Koordinasi yang berkesinambungan		

	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling			antar sesama regional
7	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan belum dilakukan secara rutin	Melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat	TW II	Telah melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat secara rutin			Pelaporan sesuai timeline dan rutin
8	IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). target PIRT 1sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Penyesuaian renlak sampel	TW II	Progress
9	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Masih sedikit pelaku usaha yang mengirimkan laporan perbaikan terhadap surat tindak lanjut yang diberikan, terutama untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA sesuai dengan timeline yang diberikan.	Sudah dievaluasi diakhir TW I	Membuat laporan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha untuk TW I			- Terdapat 9 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 15 rekomendasi yang diberikan. - Realisasi IKU pada TW I yaitu 30%, sudah mencapai

								target yang ditetapkan
10	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Belum ada feedback terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi yang sudah disampaikan kepada dinas kesehatan setempat	Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat	TW II	-	Membuat link bersama terkait tindak lanjut yang bisa diakses oleh dinas kesehatan setempat, didalam link tersebut berisi surat tembusan hasil pemeriksaan sarana dan tabel tindak lanjut yg nantinya diisi oleh dinas kesehatan	TW II	-
11	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih terdapat ketidaktepatan petugas dalam menginput hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan melalui SIPT	Membuat laporan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Sudah dievaluasi di akhir TW I	Membuat laporan monitoring dan evaluasi	-	-	Realisasi IKU pada TW I yaitu 86,67%, sudah mencapai target yang ditetapkan
12	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih banyak ditemukan sarana distribusi pangan olahan terutama sarana ritel tradisional (grosir, warung, toko,dll) dan distributor pangan yang belum	Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, seperti intensifikasi Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dan intensifikasi	Maret dan Desember	Kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 1446 H sudah dilaksanakan di Bulan Maret 2025	Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Natal dan Tahun Baru	Desember	-

		menerapkan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik serta masih banyak ditemukan pangan TMS terutama pangan rusak dan kadaluarsa.	menjelang Natal dan Tahun Baru					
13	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum melakukan penyesuaian jadwal pengawasan iklan	Membuat jadwal pelaksanaan pengawasan iklan sesuai target yang telah ditentukan	TW II	Pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan			Pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan
14	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan belum sesuai pedoman/juknis	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai pedoman/ juknis	TW II	Pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis			Pengawasan sesuai dengan pedoman/juknis
15	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaporan yang belum tepat waktu	Melaksanaan pengawasan iklan dengan tepat waktu dengan mengingatkan petugas agar tidak lewat <i>timeline</i>	TW II	Pelaksanaan pengawasan iklan yang tepat waktu			Pengawasan iklan telah dilaporkan tepat waktu
16	IKU 10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	Merupakan Indikator Kinerja baru pada Tahun 2025	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian periode berikutnya	Juni 2025	-	Melakukan monitoring dan	Juni 2025	Pemenuhan nilai SKL dapat tercapai pada triwulan I

	Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					evaluasi terhadap capaian periode berikutnya		
17	IKU 11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Belum terlaksananya perencanaan KIE Tatap Muka dan Media Sosial (TW I-IV)	Dilaksanakannya semua perencanaan yang sudah dibuatkan dan dimonitoring setiap ada kendala dan hambatan	Setiap triwulan	Sudah terlaksananya KIE tatap muka dan Media social TW I sesuai perencanaan dan adanya Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk TW I	Melaksanakan KIE Tatap Muka dan Media social TW II-IV	Pelaksanaan TW II dan TW IV	Terselenggaranya semua perencanaan KIE Tatap Muka dan Media tahun 2025 serta adanya monitoring dan evaluasi berkala.
18	IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 1 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk sekolah yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	Pengajuan penambahan anggaran	1. Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal 2. Pengajuan pembukaan blokir 3. Pelaksanaan akan dilakukan pada gedung sekolah atau	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

untuk program ini dijalankan secara daring

aula terdekat yang tidak membutuhkan biaya

4. Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi

19	IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segera	Triwulan II dan Triwulan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
20	IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 6 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Desa yang berada di	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	- Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	-Pengajuan pembukaan blokir -Pelaksanaan akan dilakukan pada aula desa terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang diintervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring

21	IKU 13. Jumlah Desa Pangan Aman	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segera	Triwulan II dan Triwulan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
22	IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	- Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	-Pengajuan pembukaan blokir -Pelaksanaan akan dilakukan pada gedung UPTD Pasar terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

23	IKU 14. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segera	Triwulan II dan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
24	IKU 15. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Blokir anggran yang telah dibuka tidak pada indikator ini, sehingga tetap masih ada efisiensi anggaran sebesar 87,94% pada indikator kegiatan ini, kegiatan 80% dialihkan secara daring, sedangkan pendampingan UMKM dimana mayoritas pelaku	Mengusulkan penambahan anggaran / pembukaan blokir untuk indikator ini	Triwulan 2	Maksimal kegiatan secara daring dan pendampingan UMKM secara daring, serta memanfaatkan layanan MPP di Kabupaten Bungo	- mengusulkan penambahan anggaran - untuk saat ini subsidi silang anggaran dengan indikator sertifikasi dan tindak lanjut untuk memenuhi	Triwulan 2 Triwulan 2	Proses

		usaha tidak paham teknologi sehingga pendampingan UMKM tidak efektif				capaian indikator ini		
25	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Anggaran SBK penindakan diblokir	Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan II Tahun 2025	Penyusunan TOR dan KAK pembukaan blokir RO QCD	-	-	N/A
26	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Terbit SPDP tanggal 14 Maret 2025	Penyerahan SPDP kepada Terlapor/Tersangka, Korwas PPNS dan Kejaksaan Negeri secepatnya	20 Maret 2025	Penyampaian SPDP kepada pihak terkait sebelum timeline habis	-	-	SPDP disampaikan sesuai dengan timeline
27	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Telah koordinasi aktif dengan CJS tetapi belum maksimal ekspos melalui media	Melakukan ekspos melalui edia atau konferensi pers terhadap kasus yang ditangani	Triwulan I Tahun 2025	Melakukan Konferensi Pers terkait kasus Obat-Obat Tertentu di Wilayah Kabupaten Merangin bertempat di Polres Merangin pada tanggal 18 Maret 2025	-	-	Konferensi Pers kasus yang ditangani sudah dilaksanakan

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo								
28	IKU 16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait operasi penindakan dan penanganan berkas perkara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	-
29	IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring
30	IKU 17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Adanya penggalangan komitmen terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja	Triwulan II Tahun 2025	Menjalin Komunikasi dengan CJS terkait rencana pelaksanaan Penggalangan	Pelaksanaan kegiatan penggalangan Bungo	Triwulan II Tahun 2025	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan

yang diselesaikan sesuai standar		di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka POM di Kabupaten Bungo	Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo				
31	IKU 18. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	Belum dilaksanakan penilaian IPP sesuai dengan arahan pusat	Pemenuhan bertahap data dukung IPP berdasarkan penilaian tahun sebelumnya	Triwulan III	-Membentuk TIM Penilaian IPP periode tahun 2025	-Membentuk Target Rencana Kegiatan dan pemenuhan penilaian IPP Periode Tahun 2025	Triwulan III	Belum terdapat penilaian dan evaluasi IPP
32	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Renstra tahun 2020-2024 belum menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian indikator sasaran (belum didukung Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi);	Memastikan Renstra telah menyajikan penjelasan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian indikator sasaran dan didukung dengan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi;	April 2025	Sudah mencantumkan matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, kebijakan dan startegi pada renstra Loka POM Kabupaten Bungo 2025-2029	-	-	-
33	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah	April 2025	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan			

		rendah dari realisasi tahun sebelumnya	dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka		realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka
34	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	April 2025	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka
35	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian target triwulan II tahun 2024 pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP		Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP
36	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	RKT Tahun 2024 belum dipublikasikan pada subsite Satuan Kerja	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja	April 2025	Melakukan publikasi seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite bungo.pom.go.id
37	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Penyusunan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi dan	Menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi,		Melakukan revisi untuk

		Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran		menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran terkait data kinerja
38	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;		Memperbaiki notulensi rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja
39	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian realisasi pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim;	April 2025	Membuat satu data internal pelaporan sebagai sumber data dalam pelaporan simetris, SKP, laporan evaluasi internal dan laporan interim yang dibuat oleh masing-masing PIC terkait

Triwulan II

40	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM sebagai dasar pemberian reward belum memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan	Menyempurnakan SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM dengan memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan pemberian penghargaan/reward	April 2025	Membuat pembaruan SK dengan melengkapi kriteria dan parameter penilaian pembobotan pemberian penghargaan/reward
41	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS tidak diisi secara tertib	Melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Januari 2025	Telah melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
42	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan terkait dengan penambahan indikator	Januari 2025	telah menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja selama tahun 2024
43	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mengikuti	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan	Membuat perencanaan dan melakukan monitoring pengembangan	April 2025

pelatihan terkait
implementasi SAKIP

Kegiatan terkait
implementasi SAKIP

kompetensi
personil Tim
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan terkait
implementasi
SAKIP

44	IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM belum menyajikan: - Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; - Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal;	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM	Januari 2025	Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai pedoman
----	--------------------------------	---	---	-----------------	---

- Identifikasi
kendala/penyebab atas
kegagalan pencapaian target
secara memadai

45	IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi	Melakukan revisi terhadap anggaran yang diblokir	Triwulan I	Melakukan efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, menyusun perubahan strategi pelaksanaan kegiatan	-	-	-
46	IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif dengan mempertimbangkan capaian target kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal dan Mengidentifikasi risiko atas seluruh program/inovasi baru yang dilaksanakan Unit Kerja dan melaporkan Manajemen Risiko tepat waktu	Januari Tahun 2025	Pelaporan manajemen risiko tepat waktu di aplikasi SAPA APIP	-	-	N/A
47	IKU 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Menyusun uraian tugas pada SKP dan MPH untuk seluruh pegawai yang	Triwulan I Tahun 2025	Penetapan SKP masing-masing pegawai yang terlibat dengan menambahkan RHK Manajemen Risiko	-	-	

			menangani manajemen risiko					
48	IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar	Belum dilaksanakan penetapan target RB Tahun 2025	Triwulan IV	Pembentukan Tim RB dan Target Kegiatan RB Tahun 2025	1. Rapat Rutin POKJA Reformasi dan Birokrasi	2025	1. Membentuk SK Tim RB 2. Menetapkan Target Rencana Aksi Pada Tahun 2025
						2. Monitoring dan Evaluasi pencapaian program setiap masing-masing POKJA dengan Pimpinan Unit Kerja	TW I, II, III dan IV	3. Membagi Target dalam SKP masing-masing pegawai
						3. Membuat link untuk pengumpulan data setiap POKJA	Februari 2025	
						4. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan reformasi birokrasi	2025	

3.3 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. 063.01.2.690923/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Awal sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pada triwulan I dilaksanakan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan dilakukan revisi DJA yang pertama pada tanggal 14 Februari 2025 melakukan pemblokiran secara mandiri dengan mencantumkan kode blokir “A” (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp. 1.644.940.000,-, selanjutnya revisi DJA yang kedua Realokasi Penambahan Anggaran dari satker lain untuk PPNPN sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sehingga pagu Loka POM Bungo menjadi Rp. 3.602.436.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dan pada tanggal 26 Maret 2025 melakukan revisi DIPA DJA Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 dapat Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 425.038.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo sampai dengan triwulan I tahun 2025 mencapai Rp. 813.884.314 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) atau mencapai 22,59% dari total pagu anggaran.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Bungo dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD.

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya

program *Automatic Adjustment* dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

- 1. Revisi DIPA DJA pada tanggal 14 Februari 2025
Jenis Revisi
 - a. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
- 2. Revisi DIPA DJA pada tanggal 18 Maret 2025
Jenis Revisi
 - 1. 211 Pemenuhan Belanja Operasional
 - 2. 221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
 - 3. 226 Penurunan Volume RO Secara Total
 - 4. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
 - 5. 307 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .B
 - 6. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- 3. Revisi DIPA DJA pada tanggal 14 Februari 2025
Jenis Revisi
 - a. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)

B. Realisasi Anggaran per Sasaran

Berikut ini tabel rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja :

Tabel 20. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis			Indikator	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,33	126,54	81.008.500	850.500	1,05	
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	81.008.500	850.500	1,05	
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	EXCLUDE PERHITUNGAN NKO						
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang	75	100	133,33	56.518.500	230.000	0,41	

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
		5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	30	100,00	35.295.600	2.793.000	7,91
		6 Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	EXCLUDE PERHITUNGAN NKO				
		7 Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	EXCLUDE PERHITUNGAN NKO				
		8 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	35.295.600	2.793.000	7,91
		9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	95,67	115,00	35.295.600	2.793.000	7,91
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	10 Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10,67	106,70	28.259.250	115.000	0,41
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11 Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	90,7	104,46	92.941.000	1.792.850	1,93
		12 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0,00	8.875.000	777.850	8,76
		13 Jumlah desa pangan aman	25	0	0,00	8.875.000	777.850	8,76
		14 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	0,00	7.100.000	622.280	8,76
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	15	75,00	372.105.000	2.660.000	0,71

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	0	15	#DIV/0!	80.651.500	10.132.500	12,56
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	41,665	83,33	80.651.500	10.132.500	12,56
7	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	306.000.000	167.481.898	54,73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	876.772.000	241.290.006	27,52
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	657.579.000	180.967.505	27,52
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	657.579.000	180.967.505	27,52
		22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100,00	1.775.000	155.570	8,76

Realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis tersaji pada tabel di atas. Dapat terlihat bahwa pada masing-masing sasaran strategis persentase realisasi anggaran paling tinggi pada 54,73% terkait Layanan Publik UPT yang prima. Sasaran Strategis lainnya penggunaan anggaran dibawah 30%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada triwulan I 2025. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel realisasi anggaran terhadap kegiatan

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Target
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
1	3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan	14	0	2%	58.000.000	1.020.000	1,76

		Obat dan Makanan oleh UPT						
2	3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	1	25%	17.862.000	1.015.000	5,68
3	3165.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	30	32%	66.204.000	-	0,00
4	3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25%	141.000.000	11.034.898	7,83
5	3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	6	25%	35.500.000	3.111.400	8,76
6	3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	100.000.000	91.897.000	91,90
7	3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	4	100%	65.000.000	64.550.000	99,31
8	3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	17%	113.037.000	460.000	0,41
9	3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	1	1	100%	103.303.000	19.245.000	18,63
10	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0%	90.970.000	-	0,00
11	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Desa Pangan Aman	1	0	0%	146.795.000	-	0,00
12	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0%	94.865.000	-	0,00
13	3165.QDG - Fasilitasi dan	001 - UMKM yang didampingi dalam	5	0	15%	39.475.000	2.660.000	6,74

	Pembinaan UMKM	pemenuhan standar oleh UPT						
14	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54	3	6%	47.517.000	456.000	0,96
15	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	250	7	3%	114.500.000	1.245.000	1,09
16	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	17	4	31%	10.534.000	3.170.000	30,09
17	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	230	23	10%	165.944.000	10.795.000	6,51
18	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	0	25%	8.000.000	-	0,00
19	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	0	28%	2.183.930.000	603.225.016	27,62

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Berikut tabel Analisis Efisiensi Kegiatan pada tiap Sasaran Strategis dan Indikator Utama Kinerja:

Tabel 21. Nilai Indeks Efisiensi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output (Kinerja)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori Capaian		
		Target	Realisasi TW I	Capaian (%)	Target	Realisasi TW I	Capaian (%)					
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT			119,42			4,37	27,32	26,32	>75 Tidak Efisien		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,33	126,54	81.008.500	850.500	1,05	120,5	119,5	>75 Tidak Efisien
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	81.008.500	850.500	1,05	127	126	>75 Tidak Efisien
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	EXCLUDE DARI PENILAIAN								
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	56.518.500	230.000	0,41	325,2	324,2	>75 Tidak Efisien
		5	Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	30	100,00	35.295.600	2.793.000	7,91	37,9	36,9	>75 Tidak Efisien
		6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	EXCLUDE DARI PENILAIAN								
		7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	EXCLUDE DARI PENILAIAN								
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,67	108,34	35.295.600	2.793.000	7,91	13,69	12,69	>75 Tidak Efisien

		9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	95,67	115,00	35.295.600	2.793.000	7,91	14,5	13,5	>75 Tidak Efisien
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT					106,70			0,41	260,2	259,2	>75 Tidak Efisien
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	10	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10,67	106,70	259,2	115.000	0,41	260,2	259,2	Tidak Efisien
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					104,46			1,93	54,12	53,12	>75 Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	90,7	104,46	92.941.000	1.792.850	1,93	54,12	53,12	>75 Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	0	0,00	8.875.000	777.850	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Jumlah desa pangan aman	25	0	0,00	8.875.000	777.850	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	0	0,00	7.100.000	622.280	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT					75,00			0,71	105,6	104,6	>75 Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	15	75,00	372.105.000	2.660.000	0,71	105,6	104,6	>75 Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					0			12,56	0	-1	<0 Tidak Efisien

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	0	15	0	80.651.500	10.132.500	12,56	0	-1	<0 Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					83,33			12,56	6,63	5,63	>75 Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	41,665	83,33	80.651.500	10.132.500	12,56	6,63	5,63	>75 Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima					0			54,73	0	-1	<0 Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	306.000.000	167.481.898	54,73	0	-1	<0 Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					0			54,73	0	-1	<0 Tidak Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	876.772.000	241.290.006	27,52	0	-1	<0 Tidak Efisien
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	657.579.000	180.967.505	27,52	0	-1	<0 Tidak Efisien
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	657.579.000	180.967.505	27,52	0	-1	<0 Tidak Efisien
		22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100,00	1.775.000	155.570	8,76	0	-1	<0 Tidak Efisien

Pada triwulan I Tahun 2025 di antara 8 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensinya dalam NKO karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sedangkan 5 Sasaran Strategis Tidak Efisien.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 4,37% sedangkan capaian kinerja sebesar

119,42 dengan hasil TE 26,32 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien, hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran sehingga penggunaan anggaran tidak maksimal.

- IKU 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 126,54% dan %capaian anggaran yaitu 1,05 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 120,5 dengan tingkat efisiensi (TE) 119,5. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya pada bulan Januari 2025, sementara Februari dan Maret 2025 belum dilaksanakan sampling karena adanya penyesuaian target sampling.
- IKU 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 133,33% dan %capaian anggaran yaitu 1,05 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 127 dengan tingkat efisiensi (TE) 126. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya pada bulan Januari 2025 sesuai renlak awal, namun tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). sehingga realisasi menjadi 100%.
- IKU 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak dilakukan perhitungan capaian penilaian pada triwulan I karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat.
- IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 133,33% dan %capaian anggaran yaitu 0,41 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 325,2 dengan tingkat efisiensi (TE) 324,2. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi,

sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya pada bulan Januari 2025 sesuai rencana awal, namun tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari target awal). sehingga realisasi menjadi 100%.

- IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 100% dan %capaian anggaran yaitu 7,91% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 37,9 dengan tingkat efisiensi (TE) 36,9. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran sebanyak 70%, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan yaitu 11% dari total target tahun 2025.
- IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dilakukan perhitungan capaian penilaian pada triwulan I karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat.
- IKU 7. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dilakukan perhitungan capaian penilaian pada triwulan I karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat.
- IKU 8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 108,34% dan %capaian anggaran yaitu 7,91% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 13,69 dengan tingkat efisiensi (TE) 12,69. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran sebanyak 70%, sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan yaitu 18% dari

total target tahun 2025. Pada TW I kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ramadhan dan menjelang idul fitri.

- IKU 9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 115% dan %capaian anggaran yaitu 7,91% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 14,5 dengan tingkat efisiensi (TE) 13,5. Hal ini disebabkan karena pengawasan iklan dilaksanakan terhadap media online dan elektronik.
2. Sasaran Strategis “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 0,41% sedangkan capaian kinerja sebesar 106,7 dengan hasil TE 259,2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien, hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran sehingga penggunaan anggaran tidak maksimal. Namun, saat ini nilai dapat diperoleh dari baseline dan upaya yang dilakukan dengan cara melakukan verifikasi metode acuan sesuai perencanaan.
 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 1,93% sedangkan capaian kinerja sebesar 104,46 dengan hasil TE 53,12 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Tidak Efisien,
 - IKU 11. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo >75 Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang masih diblokir dan perencanaan banyak dilaksanakan di Triwulan II. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan diadakan melalui daring seperti sosialisasi terkait Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting tanggal 20 Maret 2025.
 - IKU 12. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 diperoleh Capaian Tingkat

Efisiensi (TE) untuk indikator Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan kriteria Tidak Efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Tingkat efisiensi pada indikator ini, telah dilakukan revisi pengurangan anggaran sebagai berikut:

- Pengurangan anggaran paket edukasi keamanan PJAS untuk anggaran narasumber kegiatan pengawalan sekolah yg sudah diintervensi PJAS.
- Pengurangan anggaran transpor DK (paket fullday, UH fullday, dan transport peserta) kegiatan bimtek PJAS.
- Pelaksanaan kegiatan yang dialihkan secara daring
- IKU 13 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator Jumlah pasar pangan aman. Namun, karena kegiatan dilaksanakan secara daring dan tidak membutuhkan anggaran. Tingkat Efisiensi belum bisa dihitung karena belum ada parameter persentase realisasi anggaran untuk program ini. Pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan revisi pengurangan anggaran sebagai berikut:
 - Pengurangan anggaran transpor bimtek komunitas desa untuk anggaran UH fullboard kegiatan Pelatihan Fasilitator UPT BPOM Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM.
 - Pelaksanaan kegiatan yang lebih mengutamakan menggunakan kantor pemerintah daerah atau balai UPTD pasar yang dapat mengurangi penggunaan anggaran untuk fullday.
- IKU 14 Jumlah Desa Pangan Aman. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efektif karena belum dilaksanakan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, sehingga tidak ada realisasi kegiatan pada periode ini. Anggaran kegiatan ini diblokir, sehingga dibutuhkan beberapa upaya yang diperlukan untuk efektifitas kegiatan dan anggaran seperti :
 - Pengurangan honor untuk tenaga kader

- Peniadaan produk informasi untuk peserta pada saat aplikasi
 - Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan aula/balai dengan yang bisa dimanfaatkan dengan baik
 - Pengurangan uang transportasi untuk peserta
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, terdapat 1 IKU yaitu, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian kinerja sebesar 75% sedangkan capaian anggaran sebesar 0,71% dengan kategori capaian “Tidak Efisien”, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran yang digunakan. Hal ini diakibatkan karena adanya pemblokiran anggraran, sehingga sebanyak 87,94% anggaran untuk indikator ini tidak dapat digunakan. Kemudian, untuk mencapai kinerja kegiatan Loka POM telah memaksimalkan kegiatan secara daring seperti, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Pendampingan UMKM secara daring serta memaksimalkan layanan pada MPP di Kabupaten Bungo.
5. Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 103.303.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 19.245.000 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Tidak efisien karena realisasi sebesar 15 karena pada Triwulan I sudah terdapat 1 kasus yang sudah terbit SPDP, sedangkan pada perencanaan target Triwulan I Tahun 2025 adalah 0, sehingga capaian persentase tidak dapat dihitung dengan pembagi 0. Upaya yang dilakukan adalah menyelesaikan perkara sesuai dengan tahapan yang ada hingga selesai Tahap II.
6. Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 58.000.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.020.000 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tidak efisien karena sampai dengan Triwulan I anggaran masih dilakukan pemblokiran sebesar 80,86% dengan penyesuaian target output dari Deputi IV BPOM RI dari yang semula 14 menjadi 4. Efektif dan efisien akan terlihat pada akhir tahun karena penilai direktorat cegah tangkal akan dilakukan di akhir tahun.

7. Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang prima yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT Pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik belum dilaksanakan kegiatan penilaian sehingga realisasi kegiatan 0 sementara untuk realisasi anggaran sebesar 54,73 %. Kategori capaian tersebut berada pada kategori >75“Tidak efisien” karena pada Anggaran ini dimasukan anggaran pengadaan barang dan jasa untuk perkantoran yang disiapkan guna pelayanan publik yang prima sebelum dilakukan penilaian oleh pihak pusat.
8. Sasaran Strategis 8 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja, secara keseluruhan pada sasaran strategis ini 3 IKU perhitungan dilakukan di akhir tahun. Disimpulkan <0 Tidak Efisien perlu upaya peningkatan kinerja.
 - IKU 19. Nilai AKIP UPT BPOM Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru ada ketika telah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat BPOM. Capaian Anggaran pada Triwulan I mencapai Rp. 241.290.006 atau sebesar 27,52% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai AKIP UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tagging anggaran pada IKU Nilai AKIP UPT BPOM, sudah terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari bulan Januari s.d. Maret 2025
 - IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru dinilai saat Akhir Tahun berjalan. Capaian Anggaran pada Triwulan I mencapai Rp. 180.967.505 atau sebesar 27,52% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0

dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tagging anggaran pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, sudah terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari bulan Januari s.d. Maret 2025

- IKU 21. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM penilaian dilakukan di akhir tahun sehingga sampai triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi output.
- IKU 22 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efektif karena belum dilaksanakan kegiatan RB secara keseluruhan sesuai dengan target tahun 2025 dan di TW I ini hanya dilakukan progres awal dalam penetapan tim dan penentuan target RB tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Kendala

4.3 Rekomendasi



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama. Berikut rincian nilai pencapaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 119,42 dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada sasaran strategis ini dengan berkelanjutan melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji Regional serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA).

2. Capaian Indikator pada sasaran strategis Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 106,70 dengan kategori Sangat Baik.

Upaya yang dilakukan dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari perencanaan yang telah dibuat terkait capaian Standar Ruang Lingkup (SRL), pemenuhan Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium (SKL)

3. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 26,12% dengan kategori Kurang.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan diadakan melalui daring seperti sosialisasi terkait Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting, namun terdapat beberapa IKU yang tidak tercapai pada sasaran strategis ini sehingga mengakibatkan rendahnya capaian pada sasaran strategis ini.

4. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 75 dengan kategori Cukup.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan memaksimalkan kegiatan secara daring seperti, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Pendampingan UMKM secara daring serta memaksimalkan layanan pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bungo.

5. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian tidak terdefinisi dikarenakan tidak terdapat target triwulan I, tetapi terdapat realisasi sehingga diperoleh kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Upaya yang dilakukan yaitu menyelesaikan perkara sesuai dengan tahapan yang ada hingga selesai Tahap II.

6. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian Cukup

Upaya yang dilakukan yaitu adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan

7. Indikator pada sasaran strategis Layanan Publik UPT yang prima dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

8. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di Kabupaten Bungo dengan capaian Baik

Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap implementasi dan tercapainya terkait reformasi birokrasi

4.2 KENDALA

Kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

4.3 REKOMENDASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan
3. Agar mendapatkan halaman III DIPA yang baik, diharapkan melakukan monitoring Rutin Halaman III DIPA setiap bulannya dengan rapat evaluasi rutin dan melakukan revisi secara cermat dan tepat.
4. Pengelolaan kinerja anggaran yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai kinerja yang maksimal

5. Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun berjalan, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional.
6. Aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai penguji sampel mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERNANDA SAPRYANOKI

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Bungo


PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19 Persen
		01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Persen
		01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
		01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.5 Persen
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Bungo


PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan sampel makanan				37.440.000	18.720.000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				B - Rapat Regionalisasi Laboratorium				10.077.000	5.038.500		
		3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel				99.760.000	49.880.000		
		4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				B - Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Rangka Manajemen Sampling Obat Tahun 2025				7.480.000	3.740.000		
		5.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				C - Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Rangka Manajemen Sampling OBA, SK, Kosmetik Tahun 2025				7.260.000	3.630.000		
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.259.250	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Loka POM untuk Pengujian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan kuasi				5.240.000	1.310.000		
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Loka POM				5.240.000	1.310.000		
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - Pengembangan Kemampuan Laboratorium PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN DI LOKA POM UNTUK KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF				5.240.000	1.310.000		
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - Operasional Laboratorium				79.922.000	19.980.500		
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM				3.110.000	777.500		
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - Pengujian sampel dengan menggunakan Mobil laboratorium				14.285.000	3.571.250		

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - MONITORING SURAT EDARAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PANGAN DAN SUPLEMEN KESEHATAN				11.160.000		2.232.000	
		4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Produksi Luar Kota				5.774.000		1.154.800	
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, SK, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA				84.200.000		16.840.000	
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU				25.040.000		5.008.000	
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PHW				1.800.000		360.000	
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Bimtek AMR				17.650.000		3.530.000	
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Dalam Rangkan Evaluasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi				7.460.000		1.492.000	
		10.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Kota				4.760.000		952.000	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35.295.600
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Dalam Rangkan Evaluasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi				7.460.000		1.492.000	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT				84.200.000		16.840.000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET											ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				TRADISIONAL, KOSMETIKA, SK, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA								
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Setelah beredar						7.474.000	1.494.800	
		4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Produksi Luar Kota						5.774.000	1.154.800	
		5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Kota						4.760.000	952.000	
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Bimtek AMR						17.650.000	3.530.000	
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PHW						1.800.000	360.000	
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI						11.160.000	2.232.000	
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - MONITORING SURAT EDARAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PANGAN DAN SUPLEMEN KESEHATAN						11.160.000	2.232.000	
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU						25.040.000	5.008.000	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35.295.600
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Bimtek AMR						17.650.000	3.530.000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Kota				4.760.000				952.000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PHW				1.800.000				360.000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI				11.160.000				2.232.000
		5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Produksi Luar Kota				5.774.000				1.154.800
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU				25.040.000				5.008.000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Setelah beredar				7.474.000				1.494.800
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - MONITORING SURAT EDARAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PANGAN DAN SUPLEMEN KESEHATAN				11.160.000				2.232.000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Dalam Rangkan Evaluasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi				7.460.000				1.492.000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, SK, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA				84.200.000				16.840.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35.295.600
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - MONITORING SURAT EDARAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PANGAN DAN SUPLEMEN KESEHATAN				11.160.000				2.232.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Kota				4.760.000				952.000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Bimtek AMR				17.650.000				3.530.000
		4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Produksi Luar Kota				5.774.000				1.154.800
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, SK, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA				84.200.000				16.840.000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				G - Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Dalam Rangkan Evaluasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi				7.460.000				1.492.000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Setelah beredar				7.474.000				1.494.800
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PHW				1.800.000				360.000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU				25.040.000				5.008.000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI				11.160.000				2.232.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35.295.600
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,				G - Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Petugas Dalam				7.460.000				1.492.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				Rangkan Evaluasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi								
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Produksi Luar Kota				5.774.000				1.154.800
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - MONITORING SURAT EDARAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PANGAN DAN SUPLEMEN KESEHATAN				11.160.000				2.232.000
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU				25.040.000				5.008.000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, SK, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA				84.200.000				16.840.000
		6.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Kota				4.760.000				952.000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI				11.160.000				2.232.000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				H - Bimtek AMR				17.650.000				3.530.000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PHW				1.800.000				360.000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Setelah beredar				7.474.000				1.494.800
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				11.05	11.15	11.15	11.15	11.3	11.3	11.3	11.5	11.5	11.5	28.259.250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				B - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Loka POM untuk Pengujian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan kuasi				5.240.000		1.310.000	
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik untuk Loka POM				5.240.000		1.310.000	
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - Pengembangan Kemampuan Laboratorium PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN DI LOKA POM UNTUK KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF				5.240.000		1.310.000	
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - Operasional Laboratorium				79.922.000		19.980.500	
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM				3.110.000		777.500	
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - Pengujian sampel dengan menggunakan Mobil laboratorium				14.285.000		3.571.250	
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	92.941.000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PAMERAN PENYEBARAN INFORMASI				15.244.000		15.244.000	
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - Food Inspector Pertama/Muda				7.382.000		7.382.000	
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK TERAPETIK, PANGAN DAN BB SERTA OT PRODUK KOMPLEMEN				18.720.000		18.720.000	
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Forum Konsultasi Publik				6.140.000		6.140.000	
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - Penyebaran Informasi untuk desa Lokus Stunting				20.830.000		20.830.000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			E - Penyebaran Informasi Resistensi Antimikroba						1.370.000	1.370.000		
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			F - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK TERAPETIK, PANGAN DAN BB SERTA OT PRODUK KOMPLEMEN (Anggaran Non DIPA)						3.900.000	3.900.000		
		8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KIE Media Cetak/Elektronik/ Medsos/Baleho / media luar ruang						11.800.000	2.950.000		
		9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Operasional Layanan Publik						11.330.000	2.832.500		
		10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - Layanan Publikasi ke Sekolah/ Masyarakat						10.110.000	2.527.500		
		11.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - Layanan Publikasi Bersama Lintas Sektor						1.360.000	340.000		
		12.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Penyebaran Informasi pada Media Sosial						900.000	225.000		
		13.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - PRE-AUDIT/VERIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN						10.480.000	10.480.000		
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	25	50	75	80	80	80	80	80	1	8.875.000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - Layanan Publikasi ke Sekolah/ Masyarakat						10.110.000	2.527.500		
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KIE Media Cetak/Elektronik/ Medsos/Baleho / media luar ruang						11.800.000	2.950.000		
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Penyebaran Informasi pada Media Sosial						900.000	225.000		
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Operasional Layanan Publik						11.330.000	2.832.500		
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - Layanan Publikasi Bersama Lintas Sektor						1.360.000	340.000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Jumlah desa pangan aman			25	25	25	25	50	50	75	75	80	1	8.875.000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - Layanan Publikasi Bersama Lintas Sektor			1.360.000	340.000			
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - Layanan Publikasi ke Sekolah/ Masyarakat			10.110.000	2.527.500			
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Operasional Layanan Publik			11.330.000	2.832.500			
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KIE Media Cetak/Elektronik/ Medsos/Baleho / media luar ruang			11.800.000	2.950.000			
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Penyebaran Informasi pada Media Sosial			900.000	225.000			
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	25	25	25	50	50	75	75	80	1	7.100.000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Penyebaran Informasi pada Media Sosial			900.000	180.000			
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KIE Media Cetak/Elektronik/ Medsos/Baleho / media luar ruang			11.800.000	2.360.000			
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Operasional Layanan Publik			11.330.000	2.266.000			
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - Layanan Publikasi ke Sekolah/ Masyarakat			10.110.000	2.022.000			
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - Layanan Publikasi Bersama Lintas Sektor			1.360.000	272.000			
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	40	40	40	40	40	80	80	80	85,5	372.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor					A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEAMANAN PJAS					11.310.000	11.310.000
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor					B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DENGAN PEMDA					4.700.000	4.700.000
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH (2 Baru 12 PERLUASAN)					23.530.000	23.530.000
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH					7.200.000	7.200.000
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI/ PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN					1.742.000	1.742.000
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH					10.120.000	10.120.000
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN					31.828.000	31.828.000
		8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI TAHUN SEBELUMNYA					540.000	540.000
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa					A - PENGAMBILAN DATA/ SURVEY PRE DAN POST INTERVENSI DESA PAMAN					29.854.000	29.854.000
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa					B - Advokasi Kelembagaan Desa Terpadu Program Nasional Desa, PJAS dan Pasar Aman					14.410.000	14.410.000
		11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa					C - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA					31.216.000	31.216.000
		12.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa					D - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA					31.100.000	31.100.000
		13.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa					A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN					9.000.000	9.000.000
		14.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa					A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN PENGAWASAN LABEL IRTF					3.980.000	3.980.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		15.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			A - LOMBA DESA PAMAN DAN VERIFIKASI CALON DESA PAMAN			7.270.000			7.270.000			
		16.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			B - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN			6.520.000			6.520.000			
		17.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			C - PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN SEBELUMNYA (6 DESA)			9.390.000			9.390.000			
		18.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PROGRAM PPABK			10.645.000			10.645.000			
		19.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung			A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN			18.000.000			18.000.000			
		20.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			A - FASILITATOR DAN BIMTEK PENGELOLA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA			17.410.000			17.410.000			
		21.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			B - PENYULUHAN PADA KOMUNITAS PASAR			19.350.000			19.350.000			
		22.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			C - KAMPANYE PPABK			2.600.000			2.600.000			
		23.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			A - Bimtek dan Desk Registrasi CPPOB			17.879.000			17.879.000			
		24.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar			21.596.000			21.596.000			
		25.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi			A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS			17.920.000			17.920.000			
		26.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			E - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN			4.055.000			4.055.000			
		27.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			A - SURVEY DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS			8.940.000			8.940.000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT												93	80.651.500	
			NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan			A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				10.590.000		5.295.000	
			2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				9.850.000		4.925.000	
			3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - Forum Koordinasi Intelijen				6.260.000		3.130.000	
			4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan				6.260.000		3.130.000	
			5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				6.260.000		3.130.000	
			6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				6.260.000		3.130.000	
			7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan				6.260.000		3.130.000	
			8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - Pendidikan dan Pelatihan PPNS				6.260.000		3.130.000	
			9.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO		051 - Operasi Intelijen			A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				544.000		272.000	
			10.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO		051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				20.004.000		10.002.000	
			11.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO		051 - Operasi Intelijen			C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				816.000		408.000	
			12.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO		052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan				816.000		408.000	
			13.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO		053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				816.000		408.000	
			14.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN		054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan				14.070.000		7.035.000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO													
		15.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	054 - Operasi Penindakan					B - Penangkapan dan Penahanan					13.920.000		6.960.000
		16.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					A - Pemberkasan					19.341.000		9.670.500
		17.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara					2.344.000		1.172.000
		18.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					C - Gelar Perkara					1.904.000		952.000
		19.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum					1.500.000		750.000
		20.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti					8.100.000		4.050.000
		21.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)					A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitik					1.088.000		544.000
		22.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)					B - Pelaksanaan Wasmalitik					18.040.000		9.020.000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80.651.500
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan					A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan					10.590.000		5.295.000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan					A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan					9.850.000		4.925.000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan					B - Forum Koordinasi Intelijen					6.260.000		3.130.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan				6.260.000				3.130.000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan				6.260.000				3.130.000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				6.260.000				3.130.000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan				6.260.000				3.130.000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				F - Pendidikan dan Pelatihan PPNS				6.260.000				3.130.000
		9.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				544.000				272.000
		10.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				20.004.000				10.002.000
		11.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				816.000				408.000
		12.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				816.000				408.000
		13.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				816.000				408.000
		14.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				14.070.000				7.035.000
		15.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				13.920.000				6.960.000
		16.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				19.341.000				9.670.500
		17.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2.344.000				1.172.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		18.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					C - Gelar Perkara					1.904.000		952.000
		19.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum					1.500.000		750.000
		20.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	055 - Pemberkasan					E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti					8.100.000		4.050.000
		21.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)					A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik					1.088.000		544.000
		22.	DR.3165.QCD.U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)					B - Pelaksanaan Wasmalitrik					18.040.000		9.020.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													4.4	306.000.000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					C - Bimtek SAKIP dan Monev Online					4.827.000		4.827.000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					A - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					10.200.000		10.200.000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					B - Penyusunan Laporan Keuangan					20.640.000		20.640.000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					D - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/ Data Dukung dan Desk RKA-KL Pagu Anggaran					14.880.000		14.880.000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					E - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029					5.160.000		5.160.000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					F - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT					5.160.000		5.160.000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					G - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar					4.630.000		4.630.000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan					H - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)					5.160.000		5.160.000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi					A - Koordinasi Lintas Sektor					7.520.000		7.520.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
			dan Makanan													
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			B - Bimbingan Teknis Refreshment ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen Bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM								5.760.000	5.760.000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - Audit Internal Surveilans QMS ISO 9001:2015								1.564.000	1.564.000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - Audit External Surveilans QMS ISO 9001:2015								1.724.000	1.724.000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			E - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2023								6.060.000	6.060.000
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			F - Mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJ								14.680.000	14.680.000
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			G - Forum Konsultasi Publik								6.420.000	6.420.000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			H - Peningkatan Kompetensi								5.210.000	5.210.000
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - Forum Konsultasi Publik								15.125.000	15.125.000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			J - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM								6.280.000	6.280.000
		19.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran								100.000.000	100.000.000
		20.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								65.000.000	65.000.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													78.39	864.772.000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - Pengadaan Pakaian Dinas								28.800.000	11.520.000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - Belanja sewa								254.000.000	101.600.000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan								249.992.000	99.996.800
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - Langganan Daya dan Jasa								69.100.000	27.640.000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - Perawatan Sarana Perkantoran								11.540.000	4.616.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Peningkatan Kompetensi						50.357.000		20.142.800
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Kendaraan Roda 2						2.500.000		1.000.000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Perawatan Kendaraan Roda 4						15.000.000		6.000.000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pengemudi dan Petugas Keamanan						419.530.000		167.812.000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan						1.049.930.000		419.972.000
		11.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Pemutakhiran Data BMN						4.000.000		1.600.000
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian (Rekalibrasi Alat Laboratorium)						3.181.000		1.272.400
		13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Bimtek Pengelolaan BMN						4.000.000		1.600.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	648.579.000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Sarana Perkantoran						11.540.000		3.462.000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Kendaraan Roda 2						2.500.000		750.000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Perawatan Kendaraan Roda 4						15.000.000		4.500.000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan						1.049.930.000		314.979.000
		5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Pemutakhiran Data BMN						4.000.000		1.200.000
		6.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Bimtek Pengelolaan BMN						4.000.000		1.200.000
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pengemudi dan Petugas Keamanan						419.530.000		125.859.000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Peningkatan Kompetensi						50.357.000		15.107.100
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian (Rekalibrasi Alat Laboratorium)						3.181.000		954.300
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan						249.992.000		74.997.600
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - Pengadaan Pakaian Dinas						28.800.000		8.640.000
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - Belanja sewa						254.000.000		76.200.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa						69.100.000		20.730.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.55	648.579.000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				E - Langganan Daya dan Jasa						69.100.000		20.730.000
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				F - Belanja sewa						254.000.000		76.200.000
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				G - Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pengemudi dan Petugas Keamanan						419.530.000		125.859.000
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				H - Pengadaan Pakaian Dinas						28.800.000		8.640.000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				I - Peningkatan Kompetensi						50.357.000		15.107.100
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				J - Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian (Rekalibrasi Alat Laboratorium)						3.181.000		954.300
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - Operasional Perkantoran dan Pimpinan						249.992.000		74.997.600
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Bimtek Pengelolaan BMN						4.000.000		1.200.000
		9.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				B - Pemutakhiran Data BMN						4.000.000		1.200.000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan						1.049.930.000		314.979.000
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - Perawatan Kendaraan Roda 4						15.000.000		4.500.000
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - Perawatan Kendaraan Roda 2						2.500.000		750.000
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - Perawatan Sarana Perkantoran						11.540.000		3.462.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		0	5	10	20	30	40	50	60	65	70	75	100	1.775.000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - KIE Media Cetak/Elektronik/ Medsos/Baleho / media luar ruang						11.800.000		590.000
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				E - Layanan Publikasi Bersama Lintas Sektor						1.360.000		68.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - Layanan Publikasi ke Sekolah/ Masyarakat			10.110.000			505.500		
		4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - Penyebaran Informasi pada Media Sosial			900.000			45.000		
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - Operasional Layanan Publik			11.330.000			566.500		
Total														3.572.436.000		

Kabupaten Bungo, 12 February 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



[Signature]
BERNANDA SAPRYANOKI

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO tentang Rencana Kinerja Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai/ Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bungo
pada tanggal September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
8	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,39
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	90,92
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT